IMPLEMENTASI PERMENRISTEKDIKTI NO 55 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN KAMPUS

(Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh: HUSEN NIM. 101216012

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPELSURABAYA
2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Rismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Husen

NIM

: 101216012

Program Studi: Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus (Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Juli 2020

Yang menyatakan,

METERAL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Husen

NIM : I01216012

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: "Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus (Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang)", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 28 Juli 2020

Pembimbing

Zaky Ismail, M.

NIP:198212302011011007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Husen dengan Judul "Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus (Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang)" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi tanggal 28 juni 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

1147

enguji I

NIP. 198212302011011007

Penguji III

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

Penguji II

Dr. Chabib Mustofa, S.sos.i, M.Si

NIP. 197906302006041001

Penguji IV

Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004

Surabaya, 28 Juli 2020

Mengesahkan

Universias Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip. SEA, M.Phil, Ph.D

NIP.197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Nama	: Husen					
NIM	: I01216012					
Fakultas/Jurusan	: FISIP/Ilmu Politik					
E-mail address	: husenedved@yahoo.com					
UIN Sunan Ampe ✓ Sekripsi yang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain () I PERMENRISTEKDIKTI NO 55 TAHUN 2018 TENTANG					
PEMBINAAAN	IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI					
LINGKUNGAN	LINGKUNGAN KAMPUS (Studi Kasus di Universitas Negeri Semarang dan Universitas					
Semarang).						
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menakademis tanpa p penulis/pencipta da Saya bersedia unt	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.					
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menakademis tanpa p penulis/pencipta da Saya bersedia unt Sunan Ampel Sura dalam karya ilmiah	N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan. Tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta naya ini.					
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menakademis tanpa p penulis/pencipta da Saya bersedia unt Sunan Ampel Sura dalam karya ilmiah	N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan. Tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta					

Penulis

(Husen)

ABSTRACT

Husen, 2020. Implementation of Permenristekdikti Number 55 of 2018 concerning the Development of Pancasila Ideology in Student Activities in the Campus Environment (Case Study at Semarang State University and Semarang University). Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: Implementation, Permenristekdikti, Development, Radicalism.

This research originated from the author's interest when the Ministry of Research, Technology and Higher Education issued Permenristekdikti Number 55 of 2018 where the regulation was issued as an effort by the Government to prevent intolerance and radicalism in the campus environment. In this regulation, each campus has the responsibility to form the National Ideology Guard Student Activity Unit (UKM PIB) to carry out the development of Pancasila Ideology for students. The UKM PIB was formed and fostered by the Leaders of Higher Education, where the main focus of the UKM PIB activities was to provide guidance to the 4 National Pillars of the students.

On this basis, the researcher formulates the following problems: (1) How is the implementation of Permenristekdikti Number 55 of 2018 concerning the Development of Pancasila Ideology in Student Activities in the Campus Environment at Semarang State University and Semarang University? (2) How effective is the implementation of Permenristekdikti Number 55 of 2018 at Semarang State University and Semarang University?.

To get answers to the formulation of the problem, the writer used a descriptive qualitative method, with the research location being carried out at Semarang State University and Semarang University. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Test the validity of the data using data triangulation techniques. The theory used in this study uses Policy Implementation Theory according to George Edwar III which uses 4 indicators that affect the success of a policy implementation, namely Communication, Resources, Attitudes and Bureaucratic Structure. And also to measure the effectiveness of using Siagian's theory.

The results of this study indicate that the formation of UKM PIB as a form of implementation of Permenristekdikti Number 55 of 2018 both at Semarang State University and Semarang University has been quite successful and is running quite well. Meanwhile, the implementation of Permenristekdikti Number 55 of 2018 both at Semarang State University and Semarang University has been effective by using a measuring tool from Siagian which states there are seven criteria for measuring the achievement of a goal. Of the seven criteria, six of which have been met properly. Meanwhile, there are 1 criteria that have not been met.

DAFTAR ISI

HALA	MAN	JUDUL	••
PERN	YATA	AAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	i
PERS	ETUJ	UAN PEBIMBING	ii
LEMI	BAR P	PENGESAHAN	iii
LEMI	BAR P	PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABST	RAK.		V
DAFT	AR IS	SI	vii
		DAHULUAN	
		r Belakang Masalah	
		usan Masalah <mark></mark>	
		an Penelitian <mark></mark>	
		faat Penelitian. <mark></mark>	
E.		nisi Konseptual <mark></mark>	
		mplementasi <mark></mark>	
		Kebijakan	
		deologi Pancasila	
		Permenristekdikti No 55 Tahun 2018	
		Evektifitas	
F.	Penel	litian Terdahulu	22
G.	Sister	matika Pembahasan	30
BAB I	II KAJ	IIAN TEORITIK	32
A.	Kera	ngka Teori	32
	1. To	eori Implementasi Kebijakan	34
	2. To	eori Efektivitas	38
BAB I	III ME	CTODOLOGI PENELITIAN	43
A.	Meto	de Penelitian	43
В.	Loka	si dan Waktu Penelitian	44
C.	Pemi	lihan Subyek Penelitian	45
D.	Taha	p-Tahap Penelitian	47
	1. Ta	ahap Pra Penelitian Lapangan	47
	2. Ta	ahap Penelitian Lapangan	47

	3.	Tahap Analisis Data	48
	4.	Tahap Penulisan Laporan	48
Ε.	Te	knik Pengumpulan Data	48
	1.	Teknik Observasi	49
	2.	Teknik Wawancara	51
	3.	Dokumentasi	52
F.	Te	knik Analisis Data	52
	1.	Reduksi Data (Data Reduction)	53
	2.	Penyajian Data (Data Display)	54
	3.	Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)	54
G.	Te	knik Pemeriksaan Keabsahan Data	55
DADI	X 7 D	Panyajian Dan Analisis Data	57
DAD I	VF	Penyajian Dan Analisis Data	57
A.	Pe	nyajian Data	57
	1.	Gambaran Kota Semarang	57
		a. Sosial dan Budaya	57
		b. Geografi	59
		c. Pendidikan	60
		d. Agama	61
		e. Jumlah Pend <mark>ud</mark> uk	61
		f. Visi dan Misi	62
	2.	Gambaran Umum Universitas Negeri Semarang	63
		a. Sejarah Universitas Negeri Semarang	
		b. Visi dan Misi	
		c. Profil Universitas Negeri Semarang	
		d. Daftar Program Studi	
		e. Struktur Organisasi	
		f. Daftar UKM Universitas Negeri Semarang	
		g. Struktur Kepengurusan UKM PIB	
		h. Program Kerja UKM PIB	
	3.	Gambaran Umum Universitas Semarang	
		a. Sejarah Univeristas Semarang	
		b. Visi dan Misi	
		c. Daftar Program Studi	
		d. Struktur Organisasi	
70.		e. Struktur Kepengurusan UKM PIB	
В.		alisis Data	
	1.		_
		Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasisy	
		Di Lingkungan Kampus	91

	a.	Universitas Negeri Semarang	91
		1. Sejarah Pembentukan UKM PIB	91
		2. Proses Recrutmen dan Pemilihan Ketua UKM PIB	97
		3. Laporan Kegiatan UKM PIB	99
	b.	Universitas Semarang	104
		1. Sejarah Pembentukan UKM PIB	104
		2. Proses Recrutmen dan Pemilihan Ketua UKM PIB	110
		3. Laporan Kegiatan UKM PIB	112
2.	Ev	ektivitas Penerapan Permenristekdikti No 55 Tahun 2	2018128
	a.	Universitas Negeri Semarang	128
		1. Pandangan Organisasi Mahasiswa Ekstra di	UNNES
		Terhadap UKM PIB	128
		2. Tujuan dan Fungsi UKM PIB	134
		3. Efektivitas Pembentukan UKM PIB	135
	b.	Universitas Semarang	141
		1. Pandangan Organisasi Mahasiswa Ekstra di	UNNES
		Terhadap U <mark>KM PIB</mark>	141
		2. Efektivitas Pembentukan UKM PIB	146
D 4 D 77 D7	7 N T W	JTUP	1.00
A. Ke	sim	ıpulan	160
B. Sai	ran		161
ПАБТАВ	DII	JSTAKA	164
A Do	dom	nan Wawancara	170
		nentasi Penelitian	
		r Program Studi Usm	
		r Program Studi Unnes	
E. Da	ftar	r UKM Unnes	179
F. Sei	rtifi	kat Turnitin	184

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah negara tentu tidak bisa dilepaskan dari suatu ideologi yang dianutnya, karena masing-masing negara pasti mempunyai ideologi yang melekat sebagai sebuah identitas dan tak jarang ideologi ini bisa sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapainya. Ideologi juga memainkan peranan yang penting dalam proses dan memelihara integrasi nasional sebuah negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.¹

Istilah ideologi sendiri berasal dari kata *Idea*, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, serta cita-cita, dan *Logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.³

¹ Ambiro Puji Asmaroni, "Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era Globalisasi", Jurnal pancasila dan kewarganegaraan 4, No.2 (2016): 445.

² Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 60.

³ https://kbbi.web.id/ideologi diakses 28 juli 2020 pkl 01.30.

Ideologi yang dianut oleh satu negara dan lainnya berbeda-beda. Seperti negara Rusia yang menggunakan ideologi komunisme, Amerika Serikat yang menggunakan ideologi liberalisme dan juga Indonesia yang menggunakan ideologi pancasila sebagai sebuah falsafah dan identitas bangsa. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan, pemikiran seseorang atau hasil kesepakatan sekelompok orang saja sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun pancasila juga diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia disaat sebelum kemerdekaan atau sebelum membentuk sebuah negara.⁴ Jadi Pancasila merupakan sebuah ideologi yang sesuai de<mark>ng</mark>an karakter dan jati diri bangsa Indonesia, bahkan terkadang juga sering disebut sebagai sebuah ideologi non-blok, dimana Indonesia bisa menciptakan Ideologi sendiri bagi bangsa dan negaranya ditengah-tengah pertarungan Ideologi antara barat dan timur yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Kemerdekaan.

Secara umum Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tersebut hadir dalam upaya menjaga eksistensi ideologi pancasila yang akhir-akhir ini mulai terancam dengan berbagai aksi radikalisme, seperti bom bunuh diri yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan juga keinginan untuk mengganti ideologi pancasila dengan khilafah. Lebih spesifik Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu diluncurkan sebagai upaya dari Pemerintah untuk menekan

-

⁴ A. Aco Agus, "Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi", Jurnal Office 2, No. 2 (2016): 229.

dan mencegah paham-paham intoleran dan radikalisme di lingkungan kampus. Seperti yang dikutip dalam artikel di Republika.co.id, di mana Menristekdikti Muhammad Nasir menyampaikan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Alvara Research Center dengan 1.800 responden mahasiswa di 25 perguruan tinggi. Diindikasikan ada sebanyak 19,6 persen mahasiswa yang mendukung peraturan daerah (perda) syari'ah. Lalu 25,3 persen mahasiswa diantaranya setuju dibentuknya negara islam, 16,9 persen mahasiswa mendukung ideologi islam, 29,5 persen mahasiswa tidak mendukung pemimpin islam, dan sekitar 2,5 persen berpotensi radikal.⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh BIN atau Badan Intelijen Negara, dimana menurut kepala BIN saat itu, seperti dikutip okezone.com, Jenderal Pol (purn) Budi Gunawan menyebutkan bahwa sekitar 39% mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia telah terpapar paham-paham Radikal. Sebanyak 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar tingkat SMA juga setuju dengan jihad, untuk tegaknya negara islam atau khilafah. Riset BIN tersebut juga berbanding lurus dengan survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menunjukkan bahwa saat ini radikalisme telah merambah dunia mahasiswa.⁶

Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 hadir dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB) yang menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi untuk diimplementasikan di

⁵ https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/11/04/phnv9p368-permenristekdikti-552018-berpotensi-sulut-perang-ideologi. diakses 16 november 2019 pkl 12.08.

⁶ https://nasional.okezone.com/read/2018/04/28/337/1892469/bin-39-persen-mahasiswa-terpapar-paham-radikal. diakses 16 november 2019 pkl 12.40.

lingkungan kampus, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1
Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 "Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi"⁷

Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB) ini nantinya akan dibentuk dan dibina oleh pimpinan perguruan tinggi, dimana yang menjadi fokus utama dalam kegitan UKM PIB ini adalah untuk pembinaan 4 pilar kebangsaan kepada mahasiswa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 "Pembinanaan ideologi pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai satu kesatuan dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan konsensus dasar berbangsa dan bernegara" "Konsensus dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pancasila; b. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945; c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. Bhinneka Tunggal Ika" "8

Anggota UKM PIB ini dapat berasal dari organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang mahasiswanya berkuliah di kampus tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 3 Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 "Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan kemahasiswaan dapat

-

Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2018), Pasal 1 ayat (1), diakses pada 5 desember 2019, http://ditjenppkemenkumham.go.id
 Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2018), Pasal 1 ayat (1) dan (2), diakses pada 5 desember 2019, http://ditjenppkemenkumham.go.id

melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi Kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Organisasi mahasiswa intra kampus seperti Himpunan Mahasiswa (HIMA), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Senat Mahasiswa (SEMA). Sedangkan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang dimaksud seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan lainnya.

Khusus organisasi mahasiswa ekstra merupakan tempat atau sebuah wadah bagi mahasiswa untuk mencari dan menyebarkan baik itu berupa ideologi maupun idealisme yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selain itu organisasi mahasiswa ekstra juga bisa menjadi alternatif pilihan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi lebih jauh yang ada dalam diri mahasiswa itu sendiri. Serta memiliki jaringan komunikasi maupun pertemanan yang lebih luas (tidak terbatas pada satu kampus), independensi keuangan, dan kehangatan dalam interaksi. Itu adalah beberapa hal yang membuat sebagian besar alumnus dari organisasi ekstra kampus menjadi berkembang potensinya. 10

 ⁹ Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2018), Pasal 1 ayat (3), diakses pada 5 desember 2019, http://ditjenppkemenkumham.go.id
 ¹⁰ Pipin, "Dinamika Organisasi Mahasiswa Ekstra kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya (Studi pada PMII, HMI, IMM, KAMMI) 1965-2013 M", (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), diakses pada 10 desember 2019.

Meskipun banyak pihak yang mendukung dan setuju dengan langkah Menristekdikti mengeluarkan Permenristekditi No 55 Tahun 2018, namun ada juga pihak yang kontra terhadap peraturan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh pengamat terorisme dari universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar, beliau menilai bahwa dikeluarkannya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 justru bakal berpotensi menyulut api perang ideologis di kampus. "Perang ideologi bisa terjadi antara yang anti pancasila dan yang pancasilais. Juga antara sesama mazhab di dalam islam, juga antar agama". Dia juga menyarankan agar Organisasi Ekstra Kampus tetap tidak boleh masuk kampus. "Memasukkan organisasi ekstra kampus berarti mengulangi kesalahan di masa lalu. Mereka nggak boleh masuk kampus". Kata Al Chaidar, seperti termuat dalam artikel di republika.com. ¹¹

Pada awalnya penulis berpendapat bahwa tujuan utama diterbitkannya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 ini adalah agar organisasi mahasiswa ekstra bisa kembali lagi eksis di kampus dalam pengertian bisa membuka stand pendaftaran ketika ospek atau jika di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan) dan juga bisa membuka cabang komisariat di setiap fakultas. Namun pendapat penulis ternyata keliru, Menristekdikti Mohamad Nasir seperti dikutip dalam website resmi ristekdikti.go.id mengatakan "Apakah nanti semua komisariat di buka dikampus? Tidak. Yang kami dorong adalah UKM Pembinaan Ideologi Bangsa, yang dibentuk oleh Pimpinan PT dengan

https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/11/04/phnv9p368-permenristekdikti-552018-berpotensi-sulut-perang-ideologi di akses 18 november 2019 pkl 14:11

keanggotaannya dari mahasiswa/I yang tergabung dalam organisasi ekstra (kampus). Perwakilan satu persatu dari mereka, seperti dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI, Hikmahbudhi, KMHDI maupun organisasi lainnya, dapat bergabung untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran mereka". ¹²

Dari sini sudah jelas, bahwa dibentuknya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 ini adalah agar setiap kampus dapat membentuk UKM Pembinaan Ideologi Mahasiswa, yang keanggotaannya dapat berasal dari organisasi mahasiswa ekstra agar bisa bersama-sama bersinergi, mengeluarkan pimikiran dan pendapat mereka dalam upaya mengawal ideologi pancasila di lingkungan wilayah Kampus. Studi kasus dalam penelitian ini adalah di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan juga di Universitas Semarang (USM) di mana di kedua kampus tersebut telah terbentuk UKM PIB sebagai bentuk dari Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018.

UKM PIB di UNNES sendiri terbentuk dan dideklarasikan pada tanggal 2 November 2018, dimana Pak Noorochmat sebagai Pembina dari UKM PIB UNNES seperti yang dijelaskan oleh Ilham Basuki Pantja sebagai ketua UKM PIB UNNES mengatakan bahwa UNNES menjadi Universitas pertama yang membentuk UKM PIB, hal itu dikatakan oleh Pak Noorochmat dalam forum internal UKM PIB UNNES.¹³ Hal ini dapat dimengerti karena pembentukan UKM PIB di UNNES tergolong sangat cepat karena hanya

-

https://www.ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-sosialisasikan-permenristekdikti-nomor-55-tahun-2018-tentang-pembinaan-ideologi-pancasila-kepada-kelompok-cipayung-plus/diakses

¹⁷ november 2019 pkl 23:46

¹³ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 28 juni 2020.

berselang sekitar 1 minggu saja sejak Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu diundangkan yaitu pada tanggal 26 oktober 2018.

Hanya saja pernyataan itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kemenristekdikti tentang universitas mana yang pertama mendirikan UKM PIB ini, namun melihat cepatnya jarak waktu antara dikeluarkannya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu dengan deklarasi UKM PIB di UNNES bisa jadi pernyataan pak Noorochmat itu memang benar adanya. UKM PIB di UNNES sendiri berawal dari sudah adanya Komunitas Studi Pancasila (KSP) di prodi PPKn UNNES, setelah itu muncul Permenristekdikti No 55 Tahun 2018, maka dari itu dengan didukung oleh dosen-dosen jurusan PPKn dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Karakter Bangsa (P3KB) Unnes maka dibentuklah UKM PIB UNNES. 14

UNNES ternyata sudah sangat siap dan matang dalam pembentukan UKM PIB, hal ini dibuktikan dengan sudah adanya bibit bibit dari UKM PIB ini sendiri di UNNES, yaitu dengan sudah adanya Kelompok Studi Pancasila atau biasa disebut KSP dimana KSP ini berada di bawah Hima di prodi PKn dimana cakupannya memang hanya sebatas kepada mahasiswa jurusan. Sebenarnya sudah ada keinginan lama bahwa KSP di prodi PKn ini perlu dikembangkan hingga tingkat Universitas dengan anggapan jika cuma ada di tingkat jurusan secara keorganisasian KSP ini dianggap kurang serta agar

¹⁴ Muchamad Aulia Arifin, wawancara oleh penulis, 24 februari 2020.

lebih efektif dan efisien dalam tujuan mensosialisasikan pancasila kepada seluruh mahasiswa.¹⁵

Oleh karena itu ketika terdengar soal Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 ini, UNNES menyambut dengan baik dan mungkin terkesan tidak terlalu sulit untuk segera mengimplementasikan peraturan tersebut karena memang bibit bibitnya sudah ada sejak awal.. Deklarasi UKM PIB UNNES dilakukan pada tanggal 2 November 2018 pada hari jum'at tepatnya dilakukan setelah ibadah Jum'atan. 16

Sementara itu secara historis, UKM PIB di USM merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme Universitas Semarang berdasarkan instruksi langsung oleh Prof. Dr. H. Muladi, S.H. selaku Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro. UKM PIB ini dideklarasikan pada tanggal 05 Desember 2018 atau berjarak satu bulan lebih sejak Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu dikeluarkan pada tanggal 26 oktober 2018, di Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diketuai oleh Robiatul Adawiyah dengan Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H. sebagai pembimbing dan Dr. Mochamad Chaerul Latif, M.Si., Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H., dan Ade Adriansyah, A.Md., S.T., M.H. sebagai penasihat.¹⁷

Prof. Dr. H. Muladi, S.H. sebagai Ketua Pembina Yayasan Alumni Univeristas Diponegoro yang menaungi Universitas Semarang ingin agar UKM PIB di Usm dibentuk 1 bulan setelah Permenristekdikti No 55 Tahun

¹⁶ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 Juni 2020

¹⁵ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 Juni 2020

¹⁷ Tri Mulyani, wawancara oleh penulis, 28 April 2020.

2018 keluar.¹⁸ Meskipun UKM PIB telah terbentuk di USM namun dalam pendiriannya tidak berjalan lancar begitu saja, hal itu karena UKM PIB harus berjuang untuk mendapatkan legalitasnya di USM, karena diputuskan oleh Wakil Rektor III pada saat itu bahwa UKM PIB hanya diakui secara *de facto* dan baru diakui secara *de jure* di dalam kampus setelah mengikuti Musyawarah Kerja (Musyker), yang berarti Pendanaan juga baru akan di danai oleh USM mulai tanggal terhitung ditetapkannya UKM ini secara *de jure* dalam musyker.¹⁹

Dalam penelitian ini, melalui berbagai penjelasan di atas, penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya implementasi dari Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang dan juga Universitas Semarang, dimana Universitas Negeri Semarang merupakan sebuah perguran tinggi negeri dan Universitas Semarang merupakan sebuah perguruan tinggi swasta. Penting juga penting untuk mengetahui sejauh mana Efektifitas dalam penerapan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang dan juga Universitas Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang
 Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di

¹⁹ Tri Mulyani, wawancara oleh penulis, 28 April 2020.

¹⁸ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang?

2. Bagaimana Efektifitas Penerapan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Penjelasan dari Rumusan Masalah di atas, maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Permenristekdikti No 55
 Tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang.
- Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penerapan Permenristekdikti No
 Tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapat suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bagi civitas akademika, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan kepada masyarat mengenai Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018.

c. Bagi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sejenis.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.²⁰ Menurut Nurdin Usman dalam bukunya 'Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum' menjelaskan bahwa: "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau

²⁰ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 237.

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh".²¹ Sementara itu Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²² Dari beberapa pengertian tentang Implementasi diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan aktivitas ataupun tindakan yang berawal dari konsep maupun ide untuk tercapainya sebuah tujuan. Dalam hal ini implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor yang mempengaruhi atau memicu timbulnya sebuah ide maupun konsep dan itu di aktualisasikan dalam bentuk implementasi sebuah kebijakan.

2. Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Dian Fitriani Afifah mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²³ Thomas R. Dye seperti yang dikutip Dian Fitriani Afifah mendefinisikan bahwa "Kebijakan merupakan

-

²¹ Usman Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

²² Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), 39.

²³ Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur", Jurnal Ilmu Pemerintahan 2, No. 2 (2016): 335.

pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Definisi lain mengatakan kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap Pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik. 24 Jadi kebijakan itu timbul dari saran yang diusulkan oleh seseorang maupun kelompok untuk memecahkan sebuah persoalan publik maupun untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, dan kebijakan juga tidak selalu sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah, melainkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Pemerintah juga bisa disebut sebagai sebuah kebijakan.

3. Ideologi Pancasila

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi berasal dari kata '*idea*' dan '*logos*', secara harfiah dapat diartikan sebagai aturan atau hukum tentang ide. Istilah ideologi ini pertama kali digunakan oleh Antoine Destutt de Tracy, dengan maksud bahwa ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide kajian ide-ide itu

²⁴Ibid., 335.

meliputi asal-usul ide-ide mengapa muncul, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana strategi penyebarannya.²⁵

Ideologi juga mempunyai Karakteristik, Kaelan sebagaimana dikutip Ambiro Puji Asmaroini menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (a) Ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis; (b) Ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram; (c) Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan; (d) Ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis; (e) Ideologi cenderung eksklusif, absolute dan universal; (f) Ideologi memiliki sifat empiris dan normatif; (g) Ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya; (h) Ideologi biasanya terjadi dalam gerakan-gerakan politik.²⁶

Pancasila sendiri secara etimologis dalam bahasa Sansekerta (bahasa brahmana india), Pancasila berasal dari kata "Panca" dan "Sila". Panca artinya lima, Sila atau syila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi, pancasila adalah lima batu sendi atau pancasila adalah lima tingkah laku yang baik.²⁷ Secara terminologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada lima

-

²⁵ Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), 36-37.

²⁶ Ambiro Puji Asmaroini, "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi", JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 1, No. 2, (2017): 54-55.

²⁷ Sunaryo Wreksosoehardjo Dalam Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2011), 136.

prinsip dasar Negara. Pancasila juga dirumuskan berbeda-beda oleh para tokoh pada masa lalu, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.²⁸

Pancasila merupakan science of ideas dari founding father kita seperti Ir. Soekarno, Soepomo, M. Yamin, KH. Bagus Hadikusumo, dan juga tokoh-tokoh nasional lainnya yang terlibat dalam penyusunan ideologi pancasila. Pancasila merupakan Lima dasar yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui Founding Father kita yang harus dijalankan dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan, yaitu meliputi:

- 1. Ketuhanan yang maha esa.
- 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3. Persatuan Indonesia.
- 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
- 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Ideologi pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa Indonesia yang telah dipilih berdasarkan perenungan yang mendalam oleh para pendiri bangsa kita, yang diangkat dari nilai-nilai adat dan istiadat, nilai-nilai budaya, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat indonesia sejak lama. Prof. Notonagoro, sebagaimana yang dikutip Astim Riyanto mengatakan bahwa lima unsur yang tercantum di dalam pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan

²⁸ Ibid., 136.

²⁹ Nurul Fadilah, "Tantangan dan Penguatan Edeologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Eevolusi Industry 4.0", Journal of Digital Education Communication and Arts 2, No. 2 (2019): 69.

negara Indonesia, tetapi sejak sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia.³⁰

Dimana hal ini menunjukkan bahwa ideologi pancasila adalah ideologi yang khas, dimana sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Selain itu pancasila juga mempunyai kedudukan dan fungsi dalam negara dan bangsa Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Pancasila sebagai jiwa dan bangsa Indonesia, dimana lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia
- 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
- 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia
- Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia
- 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
- 7. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia
- 8. Pancasila sebagai sumber hukum nasional, merupakan sumber dari segala sumber hukum.³¹

Ideologi pancasila juga memiliki ciri sebagai sebuah ideologi yang terbuka, dimana ini berarti nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan jaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan

³⁰ Astim Riyanto, "Pancasila Dasar Negara Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 37, No. 3 (2007): 465.

³¹ August Hadiwijono, "Pendidikan Pancasila Eksistensinya Bagi Mahasiswa", Jurnal Cakrawala Hukum 7, No. 1 (2016): 85-86.

bernegara. Nilai-nilai pancasila juga merupakan sebuah prinsip dasar dalam kehidupan bersama dalam suatu kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dari sebuah bangsa yang beraneka ragam budaya dan agama seperti di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945, dimana dia mengatakan bahwa pancasila adalah satusatunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia. Selain itu, peran Pancasila dalam perdamaian dunia juga memegang peran yang sangat penting karena mampu menjadi sebuah ideologi penyeimbang antara sosialisme dan kapitalisme. Dimana hal tersebut sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia yang menginginkan terwujudnya perdamaian dunia.³²

4. Permenristekdikti No 55 Tahun 2018

Permenristekdikti adalah kepanjangan dari Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang merupakan salah satu instrument hukum. dalam penelitian yang akan dilakukan kali ini mengenai Permenristekdikti No 55 Tahun 2018, dimana didalamnya memuat tentang pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB) yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing organisasi mahasiswa ekstra untuk bersama-sama bersinergi dalam menangkal radikalisme dan penguatan terhadap ideologi pancasila di lingkungan kampus.

_

³² Septiani Dwiputri Maharani dkk., "Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila", Jurnal Ketahanan Nasional 25, No. 2 (2019): 280-281.

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi.
- (2) Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai satu kesatuan dalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan konsensus dasar berbangsa dan bernegara.
- (3) Konsensus dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 2

- (1) Pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 mengacu pada garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Garis-garis besar haluan pembinaan ideologi Pancasila menjadi dasar dan rujukan setiap kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemimpin perguruan tinggi.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan kemahasiswaan dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi.

Pasal 4

Ketentuan mengenai organisasi dan keanggotaan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

5. Efektivitas

Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, yang mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi. Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya sebuah tujuan yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Semakin tinggi hasil yang

dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat Efektivitasnya, begitu juga jika semakin rendah hasil yang dicapai, maka semakin rendah pula tingkat Efektivitasnya. Pasolong seperti yang dikutip Tria Adhinta dan Agus Widiyarta mengatakan bahwa Efektivitas berasal dari kata "Efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variable lain.³³

Sedangkan pengertian Efektivitas menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah merupakan pencapain hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Mardiasmo seperti yang dikutip oleh Alisman menyatakan bahwa Efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan maupun dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif.³⁴

Subagyo seperti yang dikutip oleh Ni Wayan Budiani mengatakan bahwa Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana

³³Tria Adhinta Indra Jayusman dan Agus Widiyarta, "Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswanggi Kecamatan Sukodono Sidoarjo", Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN Veteran Jatim 7, No. 2, (2017): 180.

³⁴ Alisman, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 1, No. 2, (2014): 50.

yang dikehendaki sebelumnya.³⁵ Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991).³⁶

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang penulis temukan dimana berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Skripsi Berjudul: "Tinjauan Terhadap Penerapan Permenristekdikti No.55 tahun 2018 Dalam Rangka Penguatan Ideologi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia)" oleh Mochammad Ramadhan F.A. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Permenristekditkti No 55 Tahun 2018 belum dapat terlaksana dengan semestinya karena peraturan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam lagi oleh pihak kampus, baik itu oleh pihak rektorat kemahasiswaan maupun

³⁵ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT 2, No. 1: 52.

³⁶ Ibid., 52.

organisasi mahasiswa sekalipun. Peraturan tersebut masih belum rampung sepenuhnya. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga merupakan kampus yang sangat sensitif apabila membicarakan organisasi ekstra kampus. Hal tersebut berlaku karena organisasi ekstra kampus di UPI belum satu persepsi terkait dengan ideologi pancasila dan pemahaman mengenai kebangsaan itu sendiri.³⁷

2. Jurnal Berjudul: "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi Melalui Pemberian Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara" oleh Prof. Dr. Ir. H. Syarif Imam Hidayat, MM. Hasil dari Jurnal ini menyimpulkan bahwa perguruan tinggi yang dibentuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan mencetak kader-kader generasi pemimpin bangsa, tentu diharapkan juga mampu memberikan muatan kurikulum yang menekankan pada terciptanya sistem pendidikan berkarakter sebagai implementasi nilai-nilai pancasila. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dilingkungan perguruan tinggi, UPN Veteran Jawa Timur menetapkan pemberian mata kuliah yang diberi nama "Pendidikan Bela Negara", sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa strata satu pada semua program studi dengan muatan 3 SKS. Dengan rincian 2 SKS untuk teori yang berisi materi tentang pengertian, unsur-

³⁷ Mochammad Ramadhan, "Tinjauan Terhadap Penerapan Permenristekdikti No.55 tahun 2018 Dalam Rangka Penguatan Ideologi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia)", (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019) diakses 22 desember 2019.

unsur bela negara dan bagaimana implementasi bela negara pada berbagai bidang dan profesi.³⁸

- 3. Jurnal Berjudul: "Pendidikan Pancasila, Eksistensinya Bagi Mahasiswa" oleh August Hadiwijono. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam mahasiswa kita dapat melakukannya dalam beberapa jalur, yaitu jalur pendidikan dan jalur organisasi serta pengamalan secra objektif dan subjektif. Bila nilai-nilai pancasila tertanam dengan baik di setiap individu mahasiswa, maka akan tercipta mahasiswa Pancasila yang mengerti norma-norma. Pengamalan pancasila dalam kehidupan dikampus sangatlah amat penting demi memajukan perguruan tinggi agar kampus dapat menghasilkan lulusan mahasiswa pancasila yang dapat membangun bangsa Indonesia. Sesuai dengan kenyataan ini, hendaknya pendidikan pancasila di perguruan tinggi harus terus dikembangkan untuk membentuk kadar yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat demi tercapainya tujuan umum bangsa Indonesia.³⁹
- 4. Jurnal berjudul "Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa" Oleh yudistira. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa mengaktualisasikan nilai pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan

³⁸ Prof. Dr. Ir. H. Syarif Imam Hidayat, MM, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi Melalui Pemberian Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara", diakses pada 22 desember 2019, www.upnjatim.ac.id

³⁹ August Hadiwijono, "Pendidikan Pancasila Eksistensinya Bagi Mahasiswa", Jurnal Cakrawala Hukum 7, No. 1 (2016).

masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai. Pancasila harus diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. 40

5. Jurnal Berjudul: "Penguatan Karakter Mahasiswa Yang berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa" Oleh Dadang Sundawa. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa dengan kondisi keberagaman bangsa Indonesia, rentan akan terjadinya konflik horizontal. Konflik yang seringkali menjadi ancaman negara Indonesia ternyata berasal dari bangsanya sendiri, yaitu gerakan separatisme dan radikalisme yang akan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Perlu adanya pemberian pemahaman dan penguatan kembali tentang karakteristik

⁴⁰ Yudistira, "Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa", Seminar Nasional Hukum 2, No. 1 (2016): 421-436.

bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap kebangsaan Indonesia sebagai salah satu langkah integrasi bangsa. Pengembangan wawasan kebangsaan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya membangun kohesi sosial di tengah warga bangsa yang majemuk. Salah satu penguatan wawasan kebangsaan adalah dengan upaya pendidikan sebagai upaya alternatif. Pendidikan yang berisi muatan wawasan kebangsaan di jenjang disampaikan persekolahan melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apalagi warga negara muda yaitu siswa dan mahasiswa sangat memerlukan wawasan kebangsaan sebagai calon generasi penerus bangsa. Desain pengajarannya dilakukan dengan mengedepankan sistem pengajaran dua arah dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion, FGD). Pendidikan kewarganegaraan yang bermuatan wawasan kebangsaan dapat mengembangkan karakter mahasiswa yang berwawasan kebangsaan.⁴¹

6. Skripsi Berjudul: "Dinamika Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya (Studi pada PMII, HMI, IMM, KAMMI) 1965-2013 M" Oleh Pipin. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi mahasiswa ekstra kampus ini muncul pada zaman orde baru yang menerapkan sistem NKK/BKK (Normaslisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordisasi Kemahasiswaan) di dalam seluruh kampus di Indonesia, termasuk kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Secara garis besar

⁴¹ Dadang Sundawa, "Penguatan Karakter Mahasiswa Yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa", Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 1, No. 1 (2017): 202-205.

sejarah organisasi mahasiswa ekstra kampus telah ada di IAIN Sunan Ampel Surabaya sejak berdirinya IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini PMII masuk ke IAIN Sunan Ampel Surabaya sekitar tahun 1965-an berkedudukan PMII Komisarit Sunan Ampel yang merupakan trnspormasi dari Komisariat Wonocolo tahnu 1960-an. Begitu pula HMI ada sejak IAIN Sunan Ampel berdiri tahun 1965-an, dengan tokoh Umar Said dan Darsono. Sedangkan, IMM di IAIN Sunan Ampel mulai dirintis tahun 1986 oleh kader-kader Muhammadiyah di IAIN salah satunya adalah Sholikin Fanani, serta pada tgl 2 Mei 2002 di depan masjid IAIN Sunan Ampel KAMMI telah dideklarasi dengan ketua umum Ali Ridho.⁴²

7. Jurnal berjudul: "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang" Oleh Natal Kristiono. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa solusi yang dapat dilakukan dalam rangka menguatkan kembali ideologi pancasila di kalangan mahasiswa yaitu dengan menunjukkan sikap positif terhadap pancasila yang dapat ditunjukkan dengan beberapa perilaku sebagai berikut: 1) Menerima pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 2) Berusaha mempelajari agar memahami makna pancasila, nilai-nilai pancasila dan kedudukan pancasila sebagai dasa negara. 3) Mempertahankan pancasila agar tetap lestari. 4) Menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang

⁴² Pipin, "Dinamika Organisasi Mahasiswa Ekstra kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya (Studi pada PMII, HMI, IMM, KAMMI) 1965-2013 M", (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), diakses pada 10 desember 2019.

- bertentangan dengan pancasila. 5) Menetapkan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6) Kesetiaan terhadap bangsa dan negara. 43
- 8. Jurnal berjudul: "Relevansi Pendidikan Pancasila dan Potret Mahasiswa Di Perguruan Tinggi" Oleh Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa relevansi nilai-nilai pada pancasila sebagai falsafah negara Indonesia tercermin di perguruan tinggi dalam tri dharma perguruan tinggi yang sesuai dengan pendidikan karakter yaitu keimanan dan ketakwaan, bertanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, persatuan, saling menghormati dan toleransi. Wujud nyatanya mahasiswa ikut berperan aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dengan mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di perguruan tinggi. 44
- 9. Jurnal berjudul: "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)" Oleh Anzhar Ishal Afryand dan Sapriya. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanan internalisasi nilai-nilai pancasila merupakan salah satu upaya mewujudkan pembudayaan pancasila salah satu upaya penguatan ideologi pancasila di masyarakat khususnya generasi muda. Selain itu internalisasi nilai-nilai pancasila yang dilaksanakan oleh

⁴³ Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang", Harmony 2, No. 2.

⁴⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Relevansi Pendidikan Pancasila dan Potret Mahasiswa Di Perguruan Tinggi", Jurnal Civic Hukum 4, No. 2 (2019).

Pusat Studi Pancasila Univeristas Gadjah Mada termasuk kedalam dimensi community civic education dan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penguatan pendidikan kewarganegaraan. Internalisasi nilai-nilai pancasila tersebut dikembangkan kedalam beberapa program dan kegiatan guna membangun pembudayaan pancasila di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas masyarakat khususnya generasi muda yang terlibat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai pancasila. 45

10. Jurnal berjudul: "Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Pendidikan" Oleh Marhan Marbawi. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa ada empat hal yang perlu diperhatikan untuk membangun watak keabadian pancasila, yaitu: 1) Menurukan turunan teoritik pancasila dalam semua aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi. 2) Pengembangan konsensus terhadap nilai-nilai pancasila. 3) Membangun framing baru pancasila sebagai ideologi. 4) merumuskan pelaksanaan nilai-nilai pancasila secara murni dan konsekuen. Penguatan ideologi pancasila mesti dilakukan secara simutan melalui pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia tidak tercerabut dari budayanya. Dalam hal ini, pendidikan islam juga berperan

⁴⁵ Anzhar Ishal Afryand dan Sapriya, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)", Untirta Civic Education Journal 3, No. 2 (2018).

penting dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia dengan idologi pancasila.⁴⁶

Dengan demikian Penelitian ini berbeda dengan Penelitian sebelumnya, karena Fokus utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 dengan studi kasus di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang, sehingga Penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

G. Sistematika Pembahasan

A. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

B. Bab II Landasan Teori

Memuat uraian tentang kerangka teori relevan yang digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan tema skripsi.

C. Bab III Metode Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi, jenis penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, serta analisis data yang digunakan.

D. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi 1.) Hasil Penelitian, klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus

⁴⁶ Marhan Marbawi, "Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Pendidikan", Turast Jurnal Penelitian dan Pengabdian 6, No. 2 (2018).

penelitiannya. 2.) Pembahasan, dimana sub bahasan 1 dan 2 dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

E. Bab V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, dan Saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh temuan pebelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kerangka Teori

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.⁴⁷ Secara umum teori adalah konsep abstrak yang nantinya akan mengisaratkan adanya hubungan dari konsep-konsep yang ada untuk memahami suatu fenomena yang ada. Kerlinger seperti yang dikutip oleh Efendi sofian mendefinisikan teori sebagai rangkaian konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara mengonstruksi hubungan antara konsep dan proposisi dengan menggunakan asumsi dan logika tertentu.⁴⁸

Adapun kerangka adalah untuk menjelaskan fenomena yang diangkat oleh penulis yaitu Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang pembinaan ideologi pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang membuat penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan, dan juga teori Efektivitas. Implementasi Kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau

⁴⁷ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001),

 $^{^{48}}$ Efendi Sofian, $Metode\ Penelitian\ Survei,$ (Jakarta: LP3ES, 2012), 35.

langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Peter deLeon dan Inda deLeon seperti yang dikutip oleh Ilham Arief menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam Implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi 3 generasi yaitu: (1) pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini, implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. (2) pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat "dari atas ke bawah". Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik, (3) pada tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan. So

Sedangkan Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya sebuah tujuan yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Semakin tinggi hasil yang dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat Efektivitasnya, begitu juga jika semakin rendah hasil yang dicapai, maka semakin rendah pula tingkat Efektivitasnya. Pasolong seperti yang dikutip Tria Adhinta dan Agus Widiyarta mengatakan bahwa Efektivitas berasal dari kata "Efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variable lain.⁵¹

⁴⁹ Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar", Jurnal Administrasi Publik 4, No. 1 (2014): 4.

⁵⁰ Ibid., 4.

⁵¹ Alisman, *Analisis Efektivitas*, 50.

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa teori Implementasi Kebijakan dan juga Teori Efektivitas.

1. Teori Implementasi Kebijakan

A. Teori George C. Edward III

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan memiliki beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu sendiri. Romauly Ferbiana Silitonga dalam Skripsinya menjelaskan bahwa menurut George Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi Implementasi sebuah kebijakan, yaitu:

1. Communication (Komunikasi)

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyempaikan sebuah informasi perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jela informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.

2. Resources (Sumber Daya)

Sumber Daya merupakan Implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. Sumber-sumber dalam Implementasi Kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana

sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam Implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relative cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan Implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan Implementasi Kebijakan, wewenang yang dimiliki Implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3. Dispotisions or Attitude (Sikap)

Merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu Implementasi Kebijakan. Implementor Kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung tercapainya sebuah kebijakan itu sendiri.

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Tahapan Implementasi Kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan Implementasi. 52

B. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

⁵² Romauly Ferbiana Silitonga, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017) diakses 11 juni 2020.

Yogi Noviantama dalam skripsinya menjelaskan bahwa Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn berawal dari sebuah argumen dimana perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, sebab pada setiap kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berlainan.⁵³ Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba <mark>untuk menghubungk</mark>an antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja. Kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan dalam Wahab. Variabel-variabel tersebut adalah:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan. Kebijakan secara menyeluruh, disamping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

⁵³ Yogi Noviantama, "Implementasi Kebijakan program pendamping desa didesa Bogorejo kecamatan Gedong tataan kabupaten Pesawaran" (Skripsi, Universitas lampung Bandar lampung, 2017), diakses pada 25 desember 2019.

tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah.

b. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Karakteristik atau sifat badan atau instansi pelaksana.

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

- d. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatankegiatan pelaksanaan. Menurut Van Meter dan Van Horn,
 prospek-prospek tentang implementasi yang efektif
 ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
 yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam
 mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut.
- e. Disposisi.

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan terhadap tiga

macam elemen yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karaktersitik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.⁵⁴

2. Teori Efektivitas

Dalam Implementasi Kebijakan juga diperlukan sebuah alat ukur ataupun kriteria dimana untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan yang telah di implementasikan telah efektiv atau tidak. Siagian seperti yang dikutip Dhimas cahyo pratama menjelaskan kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak adalah:

- Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui
 bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam

_

⁵⁴. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 164.

- melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasraansasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
- d. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indicator, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif
- f. Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuan
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna

maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. ⁵⁵

Sementara itu Riant Nugroho seperti dikutip oleh Esra Oktavia Siahaan dkk., menyebutkan bahwa terdapat lima 'tepat' yang perlu dipenuhi terkait keefektivan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Tepat Kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli
- c. Tepat Target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah

.

⁵⁵ Dhimas Cahyo Pratama, "Efektivitas Program Gerbang Desa Saburai Dalam Memajukan Desa Tertingal Di Provinsi Lampung" (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), diakses 21 juli 2020.

- target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses, yaitu Policy Acceptance, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang ahrus dilaksanakan. Dan yang terakhir Strategic Readiness, public siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan. 56

.

⁵⁶ Esra Oktavia Siahaan dkk, "Evaluasi Dampak Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Candisari Kota Semarang)", Jurnal of Public Policy and Management 7, No. 1 (2018): 4.

Martani dan Lubis menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu:

- Pendekatan Sumber yakni mengukur efektivitas dari input.
 Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2. Pendekatan Proses yakni untuk melihat sejauh mana efektivias pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3. Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.⁵⁷

⁵⁷ Dahlia dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan", Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik 8, No. 2 (2017): 3-4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai Implementasi Permenristekdikti No 55
Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus, Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Seperti yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto "Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang obyek kajian sebagai suatu sistem, artinya obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada". 58

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dimana akan mengeksplorasi suatu kasus atau berbagai macam kasus yang saling berkaitan dari waktu ke waktu melalui pengumpulan informasi ataupun data yang mendalam, dengan kata lain studi analisis adalah sebuah penelitian dengan mengumpulkan data atau menggali fenomena yang ada di masyarakat atau suatu kejadian yang telah terjadi dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu maupun sebuah program

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Revisi V* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 29.

yang secara terperinci dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁵⁹ Pendekatan ini dipilih karena lebih relevan dengan penelitian ini dimana kedua komponen tersebut menjelaskan kejadian berdasarkan sebuah fenomena implementasi dari suatu kebijakan terkait dengan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menjaring realita yang ada di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tahapan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ialah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang. Alasan Peneliti memilih Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang adalah karena UKM PIB sudah diimplementasikan dengan baik di dua kampus ini, hal ini dibuktikan dengan sudah terbentuknya Struktur Kepengurusan UKM PIB yang sudah memasuki periode ke dua, sudah adanya dana dari kampus untuk mendukung berbagai kegiatan maupun program kerja UKM PIB, sudah berjalannya program kerja yang sudah ditetapkan, sudah terbentuknya AD/ART di masing masing UKM PIB dan juga menjadi salah satu kampus pertama

⁵⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 58

yang mendirikan UKM PIB di Indonesia. Serta yang juga menarik adalah untuk membandingkan bagaimana praktek Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 ini di kampus Negeri dan juga kampus Swasta. Penelitian ini nantinya akan dilakukan antara lain di Gedung Rektorat masing-masing Universitas maupun sekretariat UKM PIB serta Komisariat dari masing-masing Organisasi mahasiswa ekstra. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Februari-April 2020.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi ataupun Informan. Informan tersebut dapat memberikan informasi berupa data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.⁶⁰ Sedangkan, untuk teknik pemilihan informan yang dipakai pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Alasan menggunakan teknik penelitian tersebut adalah peneliti menilai bahwa subjek penelitian harus memiliki pengetahuan yang baik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subjek penelitian yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang berhubungan dengan fokus penelitian itulah yang nanti akan dinilai mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian. 61 Secara spesifikasi subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu seseorang yang mengetahui serta mengerti bagaimana bentuk dari **Implementasi** proses serta

⁶⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1988), 135.

⁶¹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 88.

Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang dan juga Universitas Semarang.

Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu Bagian Kemahasiswaan, serta Pembina maupun ketua UKM PIB di Universitas Negeri Semarang dan juga Universitas Semarang. Sebagai informan kunci (key informan), sedangkan informan pendukungnya yaitu Ketua maupun Anggota dari masing-masing Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di masing-masing kampus.

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan Penelitian

No	Na <mark>ma</mark>	Jabatan
1	Noorochmat Isdaryanto, S.S., MSi.	Pembina UKM PIB UNNES
2	Muchamad Aulia Arifin	Ketua UKM PIB Pertama UNNES
5	Ilham Basuki	Ketua UKM PIB Kedua UNNES
6	Baeti	Ketua PMII Rayon Pancasila UNNES
7	Muhammad Azka Fikri	Ketua GMNI Komsat UNNES
8	Fiqi Indra Fahlupi	Kader HMI UNNES Raya
9	Ronal Sutrisno	Ketua KAMMI Komsat Soshum UNNES
10	Abror	Ketua IMM Komsat Hos Cokroaminoto UNNES
11	Tri Mulyani S.Pd., S.H.,	Pembina UKM PIB USM

	M.H.	
12	Choerunnisak	Ketua UKM PIB Kedua USM
13	Sahal	Kader PMII Komsat Sholeh Darat
14	Aldi	Kader PMII Komsat Soetta

D. Tahap Tahap Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang tahap — tahap yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian terhadap objek yang akan dikaji. Maka dari itu perlu diketahui terkait tahapan — tahapan yang harus dilalui dalam proses penelitian. Ada 4 tahap yang bisa dilakukan dalam penelitian seperti yang dijelaskan oleh Moleong: "Pelaksanaan Penelitian ada empat tahap yaitu: Pra Penelitian Lapangan, Penelitian Lapangan, Analisi Data, dan Penulisan Laporan". 62

Adapun 4 tahap – tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Tahap ini terdiri dari kegiatan penentuan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian, dan juga penyusunan usulan penelitian. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing, pembuatan proposal penelitian, pengurusan berbagai surat izin penelitian, dan juga menyiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan pada saat penelitian.

.

⁶² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991)

2. Tahap Penelitian Lapangan

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 dan juga UKMP IB di masing-masing kampus.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis mulai menelaah berbagai data yang didapat dari berbagai sumber baik itu berupa wawancara, dokumentasi, dokumen, arsip, pengamatan, dan juga data lain yang mendukung, yang selanjutnya akan dikumpulkan untuk di klasifikasi dan juga di analisis secara mendalam. Kemudian dilakukan penafsitan dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti dimana setelah itu akan dilakukan cek keabsahan data, agar data yang didapat nanti benarbenar Valid.

4. Tahap Penulisan Laporan

Ini merupakan tahap akhir dari penelitian dimana kegiatan penyusunan hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua kegiatan mulai dari pra penelitian, penelitian lapangan, dan juga analisis data. Setelah itu akan dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing agar laporan yang sedang ditulis dapat menjadi hasil karya penelitan yang maksimal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data berada dalam posisi yang paling penting dalam penelitian, dikarenakan valid tidaknya sebuah data ditentukan dalam

teknik pengumpulan data yang kemudian akan memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, tahapan ini haruslah dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data bertujuan sebagai alat pengungkap fakta perihal variabel yang akan diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Morris seperti yang dikutip oleh Hasyim Hasanah menjelaskan bahwa observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrument-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia. 63

Weick seperti yang dikutip oleh Hasyim Hasanah secara lebih mendalam menjaelaskan bahwa observasi tidak hanya meliputi prinsip kerja sederhana, melainkan memiliki karakteristik yang begitu komplek. Terdapat tujuh karakteristik dalam kegiatan observasi atau bisa disebut proses tahapan observasi yang meliputi Pemilihan (selection), Pengubahan (provocation), Pencatatan (recording), Pengkodean (encoding), Rangkaian perilaku dan suasana (test of

⁶³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", Jurnal *at-Taqaddum* 8, No. 1 (2016): 26.

behavior setting), In situ, dan untuk tujuan Empiris.⁶⁴ Prinsip umum dalam melakukan observasi adalah pengamat tidak memberikan perlakuan tertentu kepada subjek yang diamati, melainkan membiarkan subjek yang diamati berucap dan bertindak sama persis dengan kehidupan mereka sehari-hari.⁶⁵

Jadi bisa disimpulkan bahwa observasi merupakan kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara mengamati serta mencatat apa saja yang terjadi di lokasi penelitian. Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti melakukan Observasi langsung ke Universitas Negeri Semarang dan juga Universitas Semarang guna mendapatkan data terkait bagaimana proses pembentukan dan dinamika di dalam UKM PIB di masing-masing kampus serta melihat bagaimana Efektivitas dari pembentukan UKM PIB tersebut.

Peneliti melakukan observasi ke Kota Semarang sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu pada tanggal 18-22 Februari 2020 atau 5 hari 4 malam dan yang kedua adalah pada tanggal 20-22 maret 2020 atau 3 hari 2 malam. Sebenarnya penulis akan melakukan observasi lagi ke Kota Semarang untuk ke tiga kalinya dan bertemu dengan beberapa narasumber yang belum bisa ditemui, tetapi karena semakin meluasnya dampak dari wabah Pandemi Covid-19 dan juga sebagian besar daerah di Indonesia yang telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sehingga tidak memungkinkan lagi bagi penulis untuk

⁶⁴ Ibid., 26.

⁶⁵ Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrument Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan Anak 3, Edisi 1 (2014): 404.

bepergian ke luar kota maupun ke luar provinsi, juga salah satu narasumber menolak untuk ditemui secara langsung tatap muka selama Pandemi covid 19 masih berlangsung, untuk itu penulis melanjutkan sisa observasi dengan cara meminta keterangan narasumber via chat Whatsapp, Telepon, dan juga Video Call. Untuk instrumen yang digunakan pada saat pengamatan yaitu pedoman observasi, handphone, camera, buku catatan observasi dan bolpoint.

2. Teknik Wawancara

(interview) adalah salah Wawancara kaedah satu mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial, dimana kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.⁶⁶ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara Mendalam. Wawancara Mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang

⁶⁶ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya 11, No. 2 (2015): 71.

relative lama.⁶⁷ Peneliti menggunakan beberapa peralatan untuk menunjang proses wawancara mendalam, seperti tape recorder untuk merekam suara hasil wawancara, buku catatan mengenai kegiatan penelitian, dan juga kamera handphone untuk mendokumentasikan proses wawancara sebagai bukti bahwa wawancara memang benarbenar dilakukan. Informan yang menjadi fokus pada wawancara ini adalah bagian Bagian kemahasiswaan serta Pembina maupun ketua UKM PIB di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang. Maupun Ketua dan juga Anggota dari masing-masing Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di kedua kampus tersebut.

3. Dokumentasi

Setelah wawancara dilaksanakan, peneliti kemudian melakukan dokumentasi. Dimana Dokumentasi disini merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan kepustakaan. Dalam hal ini dokumen yang dimaksud oleh peneliti seperti Struktur kepengurusan, Program kerja, Anggaran, AD/ART dan juga Laporan pertanggung jawaban dari masing-masing UKM PIB yang ada di Universitas Negeri Semarang maupun Universitas Semarang.

F. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir seperti yang dikutip Ahmad Rijali mengemukakan bahwa Analisis Data sebagai "*Upaya mencari dan menata secara*

⁶⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Equilibrium 5, No. 9 (2009): 6-7.

⁶⁸ Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta; Granit, 2004), 61.

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna".⁶⁹ Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.Analisa diartikan sebagai memisah-misahkan atau menguraikan. Menganalisis data diartikan sebagai upaya menjelaskan atau menguraikan data, lalu diambil kesimpulan dari makna-makna yang didapat. Pemakaian pendekatan kualitatif deskriptif diawali dari analisa semua data yang dikumpulkan dari sebuah penelitian kemudian diarahkan dengan pembuatan kesimpulan.⁷⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh para ahli yaitu Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono. Adapun penjelasan dari teknik analisis ini diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data menurut Miles dan Huberman ialah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah proses penelitian dalam

⁶⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah 17, No. 33, (2018): 84.

⁷⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 280.

mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian kualitatif akan lebih fokus pada tujuan yang akan dicapai pada temuan. Selain itu penulis juga akan memilah temuan yang didapat di lapangan dengan mengkaji apa yang menjadi penyebab berjalannya Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang pembinaan Ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus, terselenggara dengan baik atau tidak di lapangan. Selain itu penulis akan menghimpun analisa data berupa faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Implementasi kebijakan tersebut.

2. Penyajian Data (Data Display)

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai informasi yang tersusun, memberikan adanya kesimpulan, dan tindakan tertentu. Selanjutnya melalui hal tersebut, akan di dapat dan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna untuk mempermudah langkah selanjutnya untuk menganalisis atau mengambil tindakan dengan memperdalam hasil temuan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu melalui data penelitian. Sehingga hasil dari perolehan data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Agar simpulan dalam penelitian nantinya konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan, maka penulis akan mendapati penyajian data diantaranya: Gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran umum Kota Semarang hingga di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Semarang.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan awal masih nilai sementara dan dapat berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila data yang ditemukan di tahap awal telah didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷¹

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi data digunakan untuk menguji kejujuran, subjektifitas dan kemampuan merekam data di lapangan. Dalam pengertian lain triangulasi data yaitu: pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari suatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.⁷²

Dalam prakteknya di lapangan teknik Triangulasi yang dilakukan oleh penulis di Unnes adalah dengan meminta keterangan dari Pak Noorochmat sebagai Pembina UKM PIB UNNES lalu dengan Ilham Basuki Pantja sebagai Ketua UKM PIB UNNES serta perwakilan dari

55

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alvabeta, 2014), 252.

⁷² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), 256.

masing-masing Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di UNNES yaitu GMNI, HMI, PMII, KAMMI serta IMM. Sedangkan yang dilakukan di USM adalah dengan meminta keterangan dari Bu Tri Mulyani sebagai Pembina UKM PIB USM, lalu Choerunnisak sebagai Ketua UKM PIB USM serta perwakilan dari masing-masing kader Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di USM yaitu PMII dan GMNI.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kota Semarang

a. Sosial dan Budaya

Kota Semarang mempunya penduduk yang sangat heterogen yang terdiri dari beberapa campuran etnis diantaranya adalah Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Terdapat juga etnis lain dari berbagai daerah di Indonesia yang datang ke semarang untuk berusaha menuntut ilmu maupun menetap di semarang. Hal itu mengingat Kota Semarang memiliki univeristas maupun sekolah dan perguruan tinggi yang terkenal unggulan. Mayoritas penduduk di Kota Semarang memeluk agama islam, adapun pemeluk agama lainnya seperti Kristen, Katholik, Hindu dan Budha juga cukup banyak.

Walaupun Kota Semarang sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai, toleransi kehidupan umat beragama terasa sangat tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Kota Semarang menjadi kota di Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis. Keragaman etnis yang ada di Kota Semarang juga melatar belakangi tagline dalam *city branding* Kota Semarang yaitu *Variety of Culture* dimana itu bermakna

bahwa Kota Semarang mempercantik diri dan berkembang dengan tetap mempertahankan budayanya yang heterogen. Pesan yang ingin disampaikan adalah sentuhan harominisasi berbagai budaya Jawa bersama budaya China, Arab, dan Belanda pasti dirasakan di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki keanekaragaman Budaya yang merupakan asset utama yang harus ditonjolkan, karena dampak dari keanekaragaman budaya ini memunculkan banyak jenis ragam variasi di banyak hal. Misalnya bisa dilihat dari sudut kesenian, peninggalan bangunan/arsitektur, religi, kuliner dan event lainnya.

Dari ragam variasi yang terasa di Kota Semarang tersebut dapat diketahui bahwa bahwa budaya yang ada di Kota Semarang antara lain budaya Jawa, Pesisir, Arab, dan China. Sebagai pelengkap branding Kota Semarang memiliki logo yang mencerminkan budaya Kota Semarang yaitu logo "Warak Ngendog" dimana ini merupakan binatang mitologis yang digambarkan sebagai simbol pemersatu tiga etnis mayoritas yang ada di Semarang. Bagian tubuh ikon yang terdiri dari Naga (China), Buroq (Arab), dan Kambing (Jawa). Hewan ini biasanya dijadikan mascot dalam festival dugderan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum bulan puasa.

Pembangunan budaya di Kota Semarang diupayakan untuk pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya daerah sebagai

budaya integral nasional. Kelompok-kelompok seni budaya, termasuk budaya tradisional terus dimotivasi dan didorong semangatnya untuk menekuni senii yang diminatinya, dengan menonjolkan pengembangan kreasi dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat yang haus akan inovasi. Bahkan Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memberikan suatu tempat, yaitu Teman Raden Saleh Kota Semarang, yang menyediakan berbagai fasilitas seperti panggung tertutup, sanggar terbuka dan lainnya.

b. Geografi

Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Sebuah kota besar yang sangat strategis karena berada pada posisi tengah-tengah pantai utara jawa. Nama lain yang melekat pada Kota Semarang adalah "Semarang The Beauty of Asia". Luas wilayah Kota Semarang adalah sebesar 373,70 KM² atau setara 37.366.836 Ha yang terletak antara garis 6°50' dan 7°40' Lintang Selatan dan antara 109°35' dan 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah barat dengan kabupaten Kendal, sebelah timur dengan kabupaten demak, sebelah selatan dengan kabupaten semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa.⁷⁴

Dengan luas wilayah 373,70 km² Kota Semarang terbagi menjadi tiga wilayah pembantu walikota, 16 Kecamatan dan 177

⁷³ Mayang Vini Setya, "Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2017), diakses 21 juli 2020.

⁷⁴ www.semarangkota.bps.go.id. diakses 22 juni 2020 pkl 02:40

Kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat dua kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu kecamatan Mijen (62,15 km²) dan kecamatan Gunungpati (53,99 km²). Kedua kecamatan tersebut terletak dibagian selatan yang merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar wilayahnya terdapat areal persawahan dan perkebunanan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah kecamatan Gayamsari (5,18 km²) diikuti oleh kecamatan Candisari (5,55 km²).

c. Pendidikan

Kota Semarang memiliki total Sekolah baik dari tingkatan SD, MI, SMP, MTs, SMA, dan juga MA sebanyak 908 sekolah, dengan total jumlah Murid sebanyak 263.639 jiwa dan juga total jumlah Guru sebanyak 14.339 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
SD	507	139.213	6.372
MI	84	14.099	974
SMP	180	64.250	3.640
MTs	37	8.252	783
SMA	73	32.027	1.920

⁷⁵ Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015. diakses 22 juni 2020 pkl 02.30.

.

MA	27	5798	660

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, 2019.

d. Agama

Mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam, kemudian disusul berikutnya oleh Katholik, Kristen, Hindu, dan Budha. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Pemeluk Agama

Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa)					
Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
1.509.619	120.147	124.841	10.827	18.187	2.493

Sumber: BPS Kota Semarang, 2018

e. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk di Kota Semarang Berjumlah 1.753.193

Jiwa dengan total Laki-Laki berjumlah 889.298 Jiwa dan

Perempuan sebanyak 863.895 Jiwa, yang menarik adalah Jumlah

Laki-Laki di Kota Semarang lebih banyak dari jumlah Perempuan,

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

Kelompok	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Umur			
0-9	135.497	128.153	263.650
10-19	141.531	147.029	288.560

Jumlah	889.298	863.895	1.753.193
65+	45.467	58.200	103.667
60-64	30.556	31.040	61.596
50-59	101.645	110.991	212.636
40-49	119.445	132.310	251.755
30-39	131.581	140.434	272.015
20-29	183.576	176.665	360.241

Sumber: BPS Kota Semarang, 2019

f. Visi dan Misi

Berikut adalah Visi dan Misi Kota Semarang:

VISI

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju

Masyarakat Semakin Sejahtera

MISI

- 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas.
 - 2. Mewujudkan Pemerintah Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
 - 3. Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif.⁷⁶

2. Gambaran Umum Universitas Negeri Semarang

a. Sejarah Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan perguruan tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenrstekdikti) Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan professional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya. Sebelum menjadi Universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri tahun 1965 di Kota Semarang. Secara Kronologis, perkembangan UNNES dapat diuraikan sebagai berikut:

Masa Kolonial Belanda: Cikal Bakal

Cikal bakal UNNES sudah ada sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada saat itu Pemerintahan Kolonial Belanda Menyelenggarakan sekolah guru di atas SMA. Lembaga-lembaga pendidikan guru yang saat itu didirikan oleh *Middelbaar Onderwijzer A Cursus* (MO-A) dan *Middelbaar Onderwijzer B Cursus* (MO-B). Keduanya merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk menyiapkan guru-guru SMTP dan SMTA. Setelah

⁷⁶ www.semarangkota.go.id diakses 22 juni 2020 pkl 02:25.

Indonesia Merdeka, kursus MO-A dan MO-B diselenggarakan di semarang sampai dengan tahun 1950. Dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1950, Kursus MO-A dijadikan kursus B-I dan kursus MO-B dijadikan kursus B-II yang diselenggarakan sampai dengan tahun 1960.

Periode 1960-1963: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sekolah Tinggi Olahraga (STO)

Tanggal 1 Januari 1961 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran dab Kebudayaan No. 108487/S tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan Kursus B-II diintegrasikan ke dalam Universitas Diponegoro menjadi sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pada tahun 1963, Jurusan Pendidikan Jasmani yang semula bagian dari Kursus B-II dipisah menjadi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) yang berdiri sendiri di bawah Departemen Olahraga. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Olahraga No.23 Tahun 1963 tanggal 19 April 1963.

Periode 1963-1965: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta Cabang Semarang

Sementara FKIP Undip menjalankan program-program dalam struktur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Pengajaran (PD&K) didirikan pula lembaga pendidikan

guru yang baru, yaitu Instiut Pendidikan Guru (IPG) dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKIP. Untuk menghindari dualisme dalam pendidikan guru tingkat pendidikan tinggi, Presiden RI dengan keputusan No. 1/1963 tanggal 3 Januari 1963, menyatukan FKIP dan IPG menjadi IKIP yang setara dengan universitas di dalam lingkungan Departemen PTIP. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, Menteri PTIP mendiirkan IKIP melalui Keputusan Menteri PTIP No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963.

Sebagai tindak lanjutnya diterbitkanlah Keputusan Bersama Menteri PTIP dan Menteri PD&K No. 32 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang penyatuan FKIP dan IPG di Jakarta, Bandung, Malang dan Yogyakarta ke dalam IKIP. Dengan adanya penggabungan FKIP dan IPG menjadi IKIP, sementara FKIP Undip dan FKIP Undip Cabang Surakarta dinilai belum dapat berdiri sendiri, maka keluarlah Keputusan Menteri PTIP No. 35 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 yang menetapkan: FKIP Undip menjadi IKIP Yogyakarta cabang Semarang dan FKIP Undip cabang Surakarta menjadi IKIP Yogyakarta cabang Surakarta.

Periode 1965-1999: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang

IKIP Yogyakarta Cabang Semarang berkembang dengan pesat. Agar perkembangannya lebih terarah pada masa mendatang, Menteri PTIP menerbitkan Keputusan Menteri PTIP No. 40 tahun

1965 tanggal 8 Maret 1965, yang menetapkan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang menjadi IKIP Semarang. Pada periode ini IKIP Semarang terdiri dari enam fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik. Selanjutnya berdirinya IKIP Semarang itu diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 271 tahun 1965 tanggal 14 September 1965.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 042/O/77 tanggal 22 Februari 1977 program pendidikan guru olahraga kembali lagi ke dalam induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/1982, IKIP Semarang memiliki enam fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Bahasa Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Periode 1999-Sekarang: Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi universitas, IKIP Semarang berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNNES. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/O/1999 tentang organisasi dan tata kerja Unnes dan No. 255/O/2000 tengang statuta Unnes, nama-nama fakultas di lingkungan UNNES adalah: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Program Pascasarjana.

Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1850/D/T/2006, tanggal 6 Juni 2006 dan Surat Keputusan Rektor Unnes nomor 59/O/2006 tanggal 8 Juni 2006, berdirilah Fakultas Ekonomi (Swadaya) yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Rektor UNNES. Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 3840/D/T/2007, tanggal 10 Oktober 2007 maka dibentuklah Fakultas Hukum Unnes yang diresmikan oleh Rektor UNNES pada tanggal 14 Desember 2007. Dengan berdirinya dua fakultas baru tersebut, maka saat ini UNNES mengelola delapan fakultas dan satu pascasarjana.⁷⁷

b. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Negeri Semarang

VISI

Visi UNNES Menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi Internasional.

.

⁷⁷ https://unnes.ac.id/sejarah-singkat diakses 22 juni 2020 pkl 02:07.

MISI

Misi UNNES adalah:

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam program kependidikan dan non-kependidikan yang unggul berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.
- b. Mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan,
 teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga yang
 berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.
- c. Menyebarluaskan imu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
 dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi
 internasional.
- d. Membangun dan mengembangkan kerjasama Institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional.

TUJUAN

Tujuan UNNES adalah:

- a. Mewujudkan kebudayaan unggul dalam pendididikan melalui upaya pelestarian dan pengembangan nilai pengetahuan dan keyakinan berwawasan konservasi.
- b. Mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

- c. Menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, akademisi dan profesional yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga berwawasan konservasi.
- d. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya-karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.
- e. Menjalin kerja sama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional.⁷⁸

c. Profil Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah universitas berwawasan konservasi. Visi UNNES adalah menjadi Universitas Berwawasan Konservasi Bereputasi dan Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Bereputasi internasional bermakna universitas yang memiliki citra dan nama baik dalam pergaulan internasional serta menjadi rujukan dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi di tingkat internasional.

Rumah Ilmu

-

⁷⁸ https://unnes.ac.id/visi-misi-dan-tujuan diakses 22 juni 2020 pkl 02:28.

Sebagai pendidikan bertekad lembaga UNNES mengembangkan diri menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul. Dengan tekad itu, UNNES menjaga jati dirinya sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang bertugas mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia untuk membangun keunggulan bangsa dan manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Dengan menjadi rumah ilmu berarti UNNES selalu menggunakan ilmu sebagai dasar dalam setiap kegiatan. Kegiatan terepresentasi dalam bentuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, bidang akademik maupun nonakademik. Secara akademik, kegiatan pengembangan keilmuan dilaksanakan di program studi, laboratorium, dan kegiatan lainnya. Adapun secara nonakademik, ilmu menjadi dasar dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan universitas.

Pengembang Peradaban Unggul

Sebagai Lemabaga pendidikan UNNES menjalankan tugas kebangsaan untuk menyelenggarakan pendidikan mengembangkan peradaban unggul demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat dunia. Peradaban unggul yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang unggul, nilai-nilai yang unggul. Untuk meraih itu, UNNES menyelenggarakan program pendidikan vokasi (D3), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan pendidikan

profesi. Terdapat 85 program studi yang dikelola dalam delapan fakultas dan program pascasarjana.⁷⁹

d. Daftar Program Studi

Universitas Negeri Semarang memiliki 8 Fakultas dengan total 63 Program studi yang terdiri dari 59 Program Studi S1 dan 4 Program Studi D3. Dengan rincian Fakultas Ilmu Sosial memiliki 8 jurusan, Fakultas Ekonomi memiliki 8 jurusan, Fakultas teknik dengan 14 jurusan, Fakultas Matematika dan IPA dengan 12 jurusan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 6 jurusan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan 5 jurusan, Fakultas hukum dengan 1 jurusan, Fakultas Bahasa dan Seni dengan 17 jurusan.Juga memiliki 1 Program Pascasarjana yang terdiri dari 13 Program Studi S2 dan 3 Program Studi S3.80

e. Struktur Organisasi Universitas Negeri Semarang

Tabel 4.4
Struktur Organisasi UNNES

NAMA	JABATAN
Prof. Dr. Fathur Rokhman,	Rektor
M.Hum	
Prof. Dr. Zaenuri, S.E,	Wakil Rektor Bidang Akademik
M.Si,Akt	
Dr. S Martono M.Si	Wakil Rektor Bidang Umum dan

⁷⁹ https://unnes.ac.id/tentang diakses 22 juni 2020 pkl 02:42.

https://unnes.ac.id/daftar-prodi diakses 22 juli 2020 pkl 12.59.

	Keuangan
Dr. Abdurrahman, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang
	Kemahasiswaan
Prof. Dr. Agus Nuryatin,	Wakil Rektor Bidang
M.Hum.	Perencanaan dan Kerjasana
Dr. Sugianto, M.Si	Ketua Lembaga Pengembangan
	Pendidikan dan Profesi
Dr. Suwito Eko Pramono,	Ketua Lembaga Penelitian dan
M.Pd.	Pengabdian Kepada Masyarakat
Day Cartilana M.Ci	Variala Dina Huluum dan
Drs. Sutikno, M.Si	Kepala Biro Hukum dan
/ > /	Kepegawaian
Drs. Heri Ki <mark>sm</mark> aryono, M.M.	Kepala Biro Perencanaan dan
	Keuangan
Deddy Rustiono, SE., M.Si	Kepala Biro Akademik dan
	Kemahasiswaan
Prof. Dr.rer.nat. Wahyu	Sekretaris Lembaga Penelitian
Hardyanto, M.Si.	dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat
Agung Yulianto, S.Pd. M.Si.	Ketua Badan Penjamin Mutu
Luthfi Fathan Dahriyanto,	Sekretaris Badan Penjamin Mutu
S.Psi, M.A	
Prof. Dr. Sucihatiningsih	Ketua Badan Pengembang Bisnis
Dian WP, M.Si	
Hendi Pratama, S.Pd., MA.	Kepala UPT Humas
Moh Yasir ALIMI, S.Ag.,	Kepala UPT Perpustakaan
M.A., Ph.D	

dr. Mahalul Azam, M.Kes.	Kepala UPT Puslakes
Prof. Dr. Ir. Amin	Kepala UPT Konservasi
Retnoningsih, MSi.	
Drs. Muhsin, M.Si	Kepala UPT Kearsipan
Mona Subagja, S.Pd.	Kepala UPT TIK

Sumber: https://unnes.ac.id/ppid/struktur-organisasi

f. Daftar UKM di Universitas Negeri Semarang

UNNES memiliki 63 Unit Kerja Mahasiswa (UKM) yang terbagi dalam 7 bidang diantaranya adalah Bidang Ideologi dan Penalaran dengan 4 UKM, Bidang Seni dengan 15 UKM, Bidang Kerokhanian dan Kesejahteraan dengan 6 UKM, Bidang Minat dan Kegemaran dengan 5 UKM, Bidang Minat dan Teknologi dengan 4 UKM, Bidang Olahraga dengan 25 UKM, dan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat dengan 4 UKM.

g. Struktur Kepengurusan UKM PIB Universitas Negeri

Semarang

Berikut adalah Struktur Kepengurusan UKM PIB UNNES tahun 2018-2019 yang terdiri dari total 48 anggota dan 6 bidang:

Ketua : Muchamad Aulia Arifin

Wakil Ketua : Ahmad Mario

Sekretaris I : Melynda

Sekretaris II : Siti Wulandari

-

⁸¹ Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Unnes.

Bendahara I : Rohmadhani Nur Utami

Bendhara II : Mike Meida Diningrum

Tabel 4.5 Struktur Kepengurusan

No	Bidang Kajian dan Riset	No	Bidang Diklat
1	Kresna Bayu Perdana	1	Halim Falahuddin
2	Fachrudin	2	Qoriah
3	Budi Yuliardi	3	Marcella Nur Adha
4	Rizky Gheni Praba Surya	4	Avinursholeh
5	Ilham Basuki Pantja	5	Pebrian Dwi Pamungkas
	Vitnanto		
6	Rohmawati	6	Buni Hikmawati
7	<mark>Arip Lukma</mark> n	7	Hartini
No	Bidang Sosial Budaya	No	Bidang Kajian Teknologi Pancasila
1	Fajar Sujudi	1	Rahmat Nur Kholik
2	Indra Prayoga	2	Risista Ratri Rahayu
3	Muhammad Azizul Akmal	3	Fitri Handayani
4	Eva Nur Hidayah	4	Rifqi Awaludin
5	Gilang	5	Wiwin Frawinda
6	Tri Murti	6	Dinda Oktaforryka
7	Della Triana Agustin	7	Hajar Fitri
No	Bidang Kemitraan dan Kerjasama	No	Bidang Dokumentasi Publikasi

1	Nurul Hidayah	1	Lutfi Adi Pradana
2	Adelia Dwi Rahmawati	2	Ridwan Ferdianto
3	Safira Alicia	3	Winar Afitriani
4	Ahmad Yasir Fathan	4	Shofiana
5	Anik Marcella	5	Imroatun Ulin N
6	Hana Hidayatuzzakia	6	Kharisma Adi S
7	Lia Agustina		
8	Khoirul Latif		

Sumber: Data UKM PIB Unnes

h. Program Kerja UKM PIB Universitas Negeri Semarang

Berikut merupakan Program Kerja UKM PIB UNNES Tahun 2018-2019:

1. Bidang Kajian dan Riset:

1. Kajian Pancasila

Diskusi terkait segala aspek tentang kepancasila-an serta membahas isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Bedah buku

Mengupas isi buku dengan dipandu oleh pihak yang memahami buku tersebut secara komprehensif/mendalam.

3. Kepustakaan

Pencatatan judul-judul buku yang dimiliki anggota untuk kemudian bidang ini sebagai fasilitator dalam peminjaman buku oleh anggota satu ke anggota yang lain yang memiliki buku tersebut.

2. Bidang Diklat

1. Pelatihan Lembika (Lempar Pisau dan Kapak)

Pelatihan olahraga Lempar Pisau dan Kapak sebagai pengembangan kecakapan dan keterampilan anggota UKM PIB dibidang olahraga.

2. Pelatihan Protokoler

Pelatihan dalam bidang keprotokoleran (tata upacara, tata tempat, tata ruang, dsb) sebagai pengembangan pengetahuan, kecakapan serta keterampilan anggota UKM PIB.

3. Peringatan Hari Besar

Berisi kegiatan refleksi, diskusi, upacara/apel, diskusi, serta kegiatan latihan lainnya terkait hari besar nasional yang sedang diperingati.

3. Bidang Teknologi Pancasila

 Workshop tentang teknologi Pancasila, khususnya pemanfaatan teknologi di era milenial sesuai dengan Pancasila.

4. Bidang Kerjasama dan Kemitraan

1. KIP (Kajian Ideologi Pancasila)

Dalam program kerja ini dilakukan dengan membahas mengenai beberapa kajian ilmiah mengenai Pancasila. Dalam bidang ini kajiannya lebih menitikberatkan pada kerjasama dengan UKM lain yang ada di Unnes atau UKM PIB di Universitas lain.

2. Anjangsana

Anjangsana mempunyai arti berkunjung. Dalam hal ini berkunjung ke UKM PIB di universitas lain. Dimana kegiatan didalamnya lebih memfokuskan pada bagaimana implementasi UKM PIB di masing-masing universitas. Lebih banyak berbagi pengalaman mengelola UKM PIB di setiap Universitas.

3. UKM PIB Fair

Setiap tahun di Universitas Negeri Semarang ada kegiatan yang bernama Unnes Fair. Kegiatan ini merupakan kegiatan pameran setiap UKM yang ada di UNNES. Seperti biasanya kegiatan ini UKM PIB mendirikan stand seperti UKM yang lainnya dan berbagi informasi kepada mahasiswa UNNES mengenai UKM PIB.

5. Bidang Seni dan Budaya

Program kerja sosial budaya lebih berorientasi pada kepedulian sosial dan pelestarian budaya, dan sebagai sasaran nya ada dua yang dituju oleh Bidang Soial Budaya, *Pertama*, Masayarakat luas, dan *Kedua*, Organisasi kampus baik internal maupun eksternal. Pada hakikatnya memang bidang ini salah satu bidang yang ada di Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Pancasila atau sering akrab kita sebut (UKM PIB) yang tujuannya mengawal pergerakan mahasiswa supaya tidak keluar dari haluan semestinya atau *Out Of The Line*. Akan tetapi terlepas dari itu, UKM ini juga memiliki peran terhadap perkembangan masyarakat, yaitu untuk menjadikan masyarakat sebagai salahsatu objek dari program kerja yang tentu saja bertujuan untuk memberikan dedikasi dan akulturasi budaya berpancasila kepada masyarakat.

Upaya mengawali penghidupan dibidang ini, saya sebagai kepala bidang ingin sekadar mendeskripsikan program kerja yang nanti akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini yaitu *Pengabdian Kepada Masyarakat*, seperti yang dijelaskan diatas bahwa bidang ini juga memiliki orientasi terhadap masyarakat guna memberikan dedikasi dan akulturasi budaya berpancasila. Kegiatan ini akan berawal dari survei terlebih dahulu, agar mendapatkan

data terkait kekurangan dan kelebihan yang dimiliki disuatu tempat yang diinginkan.

Program ini bernamakan Pengabdian Masyarakat yang akan beroprasi dengan menggunakan wayang, kenapa wayang? karena wayang adalah suatu Icon budaya di Indonesia, terlepas dari itu, wayang juga akan menjadi daya tarik masyarakat khususnya anak-anak untuk mengikuti program kami. Jadi kami akan menggunakan wayang yang terbuat dari karton untuk media kita, untuk materinya sendiri akan kami buat cerita sejarah terbentuknya Tokoh-tokohnya, Pancasila, dan cara mengimplementasikannya. Lalu siapa saja yang bisa ikut dalam program ini? pengabdian masyarkat ini terbuka untuk siapa saja yang berkenan mengabdikan diri kepada masyarakat. Kapan akan dilaksanakan? program ini akan dilaksanakan dua minggu sekali, karena tim juga perlu menyiapkan aktor baru dalam pewayangan dan membuat cerita baru untuk diceritakan. Semoga bermanfaat.

6. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- 1. Pembuatan logo.
- 2. Pembuatan akun media sosial.

3. Bekerja sama dengan bidang riset dan kajian untuk memposting kutipan tokoh/buku setiap hari.⁸²

3. Gambaran Umum Universitas Semarang

a. Sejarah Universitas Semarang

Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal politeknik (Politeknik Semarang) yang memiliki 4 program studi D-III yaitu Kepaniteraan Hukum, Manajemen Perusahaan, Teknik Sipil Hidro, dan Teknologi Hasil Pertanian. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang (USM) yang saat ini memiliki 15 program studi yaitu D-III Manajemen Perusahaan, S-1 Ilmu Hukum, S-1 Manajemen, S-1 Akuntansi, S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Elektro, S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S-1 Teknologi Hasil Pertanian, S-1 Psikologi, S-1 Sistem Informasi, S-1 Teknik Informatika, S-1 Ilmu Komunikasi, S-2 Magister Manajemen, S-2 Magister Ilmu Hukum dan S-2 Magister Psikologi.

Pada awalnya USM menggunakan 2 kampus yaitu kampus I (3.000 m2) terletak di pusat kota (Jl. Admodirono No. 11) dan kampus III (27.721 m2) di Jl. Soekarno-Hatta, Arteri Tlogosari kira-kira 3 km sebelah timur pusat kota Semarang. Serta kampus II

⁸² Data UKM PIB Unnes.

di daerah Mrican, yang masih terdiri dari lahan seluas 12.252 m2. Namun mulai Februari tahun 2010, seluruh kegiatan akademik USM terpusat di kampus III dengan total 8 gedung masing-masing berlantai 3. Saat ini sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi pada pendidikan akademik maupun vokasi. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara rutin setiap tahun, baik yang dibiayai oleh Yayasan Alumni UNDIP / USM maupun oleh lembaga / lembaga eksternal.

Kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ini didukung oleh 354 tenaga pendidik dan 173 tenaga pendukung yang mengabdikan diri sebagai pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan senior yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan. Sebagian besar pelajar berasal dari Jawa Tengah diterima dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, beberapa provinsi lain di Indonesia. Untuk mendukung kemampuan dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan ilmu dan karya ilmiah, USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan (UKM). Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi baik di tingkat regional, nasional hingga internasional. Fasilitas lain yang disediakan meliputi Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Pusat Pelatihan Bahasa (LTC), Kantor Internasional (IO), Gelanggang

Olahraga (Gelora), lapangan basket, lapangan volley, poliklinik, kantin, KOPIMA, bank / ATM BNI, masjid, warnet, dan lain-lain.

USM menawarkan program pendidikan akademik dan vokasi. Program akademik meliputi: Program Studi S1 Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, Psikologi, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Perencanaan Wilayah dan Kota, Ilmu dan Teknologi Pangan, Produksi Ternak, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, dan Program Studi S2 Magister Manajemen (MM). Sedangkan program pendidikan vokasi meliputi; Program Studi D-III Manajemen Perusahaan. Sistem pembelajaran menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, 30% kuliah/handout diupayakan berbahasa Inggris. Sesuai dengan visinya, USM menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan kompetensi di bidangnya dengan kemampuan global, terutama kemampuan berbahasa Inggris dan penggunaan teknologi informasi/komputer yang dilakukan dengan sistem sertifikasi.83

b. Visi, Misi, dan Tujuan Univeritas Semarang

VISI

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya insan yang professional dan beradab serta berkeindonesiaan, yang berwawasan

.

⁸³ https://usm.ac.id/pages/view/Selayang-Pandang diakses 22 juni 2020 pkl 03.05.

teknologi informasi dan pembangunan berkelanjutan yang mampu berdaing baik secara nasional maupun global.

MISI

- 1. Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi
- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, yang dilandasi dengan asas kebenaran, keadilan dan kemandirian (kerakter ke Indonesiaan).
- 3. Pengembangan dan penciptaan, serta penyebaran ipteks berwawasan pembangunan yang berkelanjutan dan teknologi infromasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu bersaing secara nasional maupun global.

TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui budaya akademik yang didukung dengan kinerja yang baik dan berdasarkan atas kebenaran, keadilan dan kemandirian, terbuka, kritis, kreatif, inovatif dan tanggap terhadap perubahan nasional maupun global, maka tujuan Universitas Semarang yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah:

 Menghasilkan lulusan berkemampuan akademik, vokasi, dan profesil yang berkualitas dalam berbagai bidang ilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, berwawasan kebangsaan, serta berbudi luhur (karakter ke Indonesiaan), yang mampu bersaing baik secara nasional maupun global.

- Mengembangkan dan menciptakan IPTEKS dalam berbagai bidang ilmu berwawasan pembangunan yang berkelanjutan dan menguasai teknologi infromasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan mampu bersaing secara nasional maupun global.
- 3. Menerapkan dan menyebarluaskan IPTEKS dalam berbagai bidang ilmu.⁸⁴

c. Daftar Program Studi

Universitas Semarang memiliki 6 Fakultas dengan 12 Program Studi S1 dan Memiliki 2 Program Studi Magister S2. Dengan rincian Fakultas Ekonomi memiliki 3 Program Studi, Fakultas Teknik dengan 3 Program studi, Fakultas TIK dengan 3 Program Studi, Fakultas TS dengan 1 Program Studi, Fakultas TP dengan 1 Program Studi, dan Fakultas Hukum dengan 1 Program Studi. Adapun 2 Program Magister yang dimiliki adalah S2 Hukum dan S2 Manajemen.⁸⁵

d. Struktur Organisasi Universitas Semarang

_

⁸⁴ https://usm.ac.id/pages/view/Visi-Misi-Dan-Tujuan. diakses 22 juni 2020 pkl 03.45.

⁸⁵ https://usm.ac.id. diakses 22 juni 2020 pkl 04.30.

Struktur Organisasi di Universitas Semarang meliputi Pimpinan, Pembantu Pimpinan, Pembina Yayasan Alumni UNDIP, Pengurus Yayasan Alumni UNDIP, Pengawas Yayasan Alumni UNDIP, dan Dewan Penyantun.

Tabel 4.6 Struktur Organisasi USM

PIMPINAN		
NAMA	JABATAN	
Andy Kridasusila, SE, MM	Rektor	
Prof. Dr. Dra. Hardani Widhiastuti, MM., psikolog	Wakil Rektor I Bidang Akademik	
Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahju <mark>ningsih, M</mark> P	Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	
Dr. Supari, S.T., M.T.	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan	
PEMBANTU	U PIMPINAN	
Prof. Dr. Ir. V. Priyo Bintoro,	Staf Ahli Wakil Rektor 1	
M.Agr		
Tirta J Kumkamdhani S.Kom,	Ka. Biro Administrasi	
MM	Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	
Teti Susilowati, SE, MM	Ka. Biro Administrasi Umum	
	dan Keuangan	
PEMBINA YAYASAN ALUMNI UNDIP		
Prof. Dr. H. Muladi, SH	Ketua	

Prof. Dr. Miyasto, SU	Anggota	
Dr. Diah Sulistyani RS, SH. MH.	Anggota	
Ir. Soeharsojo	Anggota	
PENGURUS YAYAS	SAN ALUMNI UNDIP	
Prof. H. Abdullah Kelib, S.H	Ketua	
Dian Indriana Trilestari, S.E., Msi, AK, CA	Sekretaris Bidang Internal	
Eddy Djoko Pramono, S.H., M.H., M.T.	Sekretaris Bidang External	
Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.	Bendahara	
Ir. Sudjatinah, M.Si	Wakil Bendahara	
PENGAWAS YAYASAN ALUMNI UNDIP		
Maryono, SE, MM	Ketua	
Doddy Krid <mark>as</mark> aksana, SH, MH	Anngota	
Prof. Dr. Ir. V. Priyo Bintoro, M.Agr	Angota	
DEWAN PENYANTUN		
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.	Ketua	
Drs. Kodradi	Wakil Ketua	
Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD	Anggota	

Sumber: usm.ac.id

e. Struktur Kepengurusan UKM PIB USM

Berikut adalah Struktur kepengurusan UKM PIB USM tahun 2018-2019 dan 2019-2020:

Tabel 4.7 Struktur Kepengurusan 2018-2019

Penasehat	Dr. Mocahmad Chaerul Latif,
	M.Si
	Dr. Muhammad Junaidi,
	S.H.I., M.H.
	Ade Adriansyah, AMd., S.T.,
	M.H.
Pembina	Tri Mulyani, S.Pd., S.H.,
	M.H.
Ketua	Robiatul Adawiyah
	(A.131.15.0135)
Wakil Ke <mark>tu</mark> a	Choerunnisak
	(B.111.16.0261)
Sekretaris	Agus Surono (A.131.15.0224)
Bendahara	Umi Fatimah (A.111.18.0082)
Bidang Kajian dan Analisis	Ari Nugroho (A.131.15.0007)
	Lia Mahrita (D.111.17.0091)
	Diana Ayu Nurul Aliya
	(F.111.18.0084)
	Nur Khasanah
	(A.111.17.0028)
Bidang Pengawal Ideologi	Fathulloh Ahmad
Bangsa	(D.111.17.0076)

	Novi Maharani
	(A.131.16.0106)
	Lady Prismawati
	(F.111.18.0098)
	Adinda Tuning Hapsari
	(D.111.17.0101)
Bidang Kerjasama	Muhammad Arafat
	(A.131.18.0126)
	Sidik Kahono
	(A.131.15.0023)
	Kharis Syahrial Alif Mamanto
	(A/141.16.0006)
	Kholid Fathoni Al Miftah
	(A.131.15.0034)
Bidang Pengembangan	Nofia Nur Latifah
Sumber Daya	(A.131.15.0018)
	Norma hinggil
	(D.111.17.0041)
	Iswatun Hasanah
	(D.111.17.0020)
	Yuni Siti Rokhayatun
	(F.111.18.0129)
Bidang Forum Komunikasi	Suharti (D.111.17.0007)
	Siti Karomah (D.111.17.0072)

Diah Ismawati
(A.111.18.0074)
Guslim Firda Rizki
(A.111.16.0101)
Abdul Kadir Assegaf
(G.111.14.0031)

Sumber: Data UKM PIB USM

Tabel: Struktur Kepengurusan 2019-2020

Ketua	Choerunnisak (B.111.16.0261)
Wakil Ketua	Lia Mahrita (D.111.17.0091)
	Lia Walifita (D.111.17.0031)
Sekretaris	Agus Surono (A.131.15.0224)
	Novi Maharani
	(A.131.16.0106)
Bendahara	Umi Fatimah (A.111.18.0082)
	Diana Ayu N. A
	(F.111.18.0084)
Bidang Kajian Dan Analisis	Siti Karomah (K)
	(D.111.17.0072)
	Yuni Siti R (F.111.18.0129)
Bidang Pengawal Ideologi	Nur Khasanah (K)
Bangsa	(A.111.17.0028)
	Lady Prisma (F.111.18.0098)

Bidang Kerjasama	Iswatun Hasanah
	(D.111.17.0020)
	Norma Hinggil
	(D.111.17.0041)
	Beni Johan
Pengembangan Dan Sumber	Adinda Tuning H (K)
Daya	(D.111.17.0101)
Daya	Diah Ismawati
	(F.111.18.0074)
	Alfons I Sainyakit (A.111.17.0163)
	(11.111.17.0103)
Bidang F <mark>or</mark> um Komunikasi1	Suharti (K) (D.111.17.0007)
	M. Arafat (A.131.18.0126)
	Farisa Dwi Kurniawan
	(G.311.18.0100)
	Guslim Firda Riski
	(A.111.16.0101

Sumber : UKM PIB USM

B. Analisis Data

- Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
 - a. Universitas Negeri Semarang
 - 1. Sejarah Pembentukan UKM PIB UNNES

Gambar 4.1
Deklarasi Pembentukan UKM PIB UNNES



UKM PIB di UNNES dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 2 November tahun 2018 dimana Pak Noorochmat sebagai Pembina dari UKM PIB UNNES seperti yang dijelaskan oleh Ilham Basuki Pantja sebagai ketua UKM PIB UNNES mengatakan bahwa UNNES menjadi Universitas pertama yang membentuk UKM PIB, hal itu dikatakan oleh Pak Noorochmat dalam forum internal UKM PIB UNNES.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ilham Basuki Pantja sebagai berikut:

"Jadi begini mas pak noor mengatakan unnes yang pertama itu berdasar pada sepengetahuan beliau dan kami yang rasa rasanya unnes itu salah satu yang pertama dan barangkali bisa jadi yang pertama dilihat dari jarak waktu dikeluarkannya permen tersebut, dengan catatan itu beliau katakan hanya di forum internal pib dan belum pernah mengatakan diluar, mengingat kita juga belum tau pasti data yang resmi dari pusat siapa yang pertama" s

Hal ini dapat di mengerti karena pembentukan UKM PIB di Unnes tergolong sangat cepat karena hanya berselang sekitar 1 minggu saja sejak Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu Diundangkan yaitu pada tanggal 26 oktober 2018. Hanya saja pernyataan itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kemenristekdikti tentang Universitas mana yang pertama mendirikan UKM PIB ini, namun melihat cepatnya jarak waktu antara dikeluarkannya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 itu dengan deklarasi UKM PIB di UNNES bisa jadi pernyataan pak Noorochmat itu memang benar adanya.

Namun meskipun tergolong sangat cepat dalam membentuk UKM PIB, UNNES ternyata sudah sangat siap dan matang dalam pembentukan UKM PIB, hal ini dibuktikan

.

⁸⁶ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 28 juni 2020

dengan sudah adanya bibit bibit dari UKM PIB ini sendiri di UNNES, yaitu dengan sudah adanya Kelompok Studi Pancasila atau biasa disebut KSP dimana KSP ini berada di bawah Hima di prodi PKn dimana cakupannya memang hanya sebatas kepada mahasiswa jurusan.

Sebenarnya sudah ada keinginan lama bahwa KSP di prodi PKn ini perlu dikembangkan hingga tingkat Universitas dengan anggapan jika cuma ada di tingkat jurusan secara keorganisasian KSP ini dianggap kurang serta agar lebih efektif dan efisien dalam tujuan mensosialisasikan pancasila kepada seluruh mahasiswa. Oleh karena itu ketika terdengar soal Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 ini UNNES menyambut dengan baik dan mungkin terkesan tidak terlalu sulit untuk segera mengimplementasikan peraturan tersebut karena memang bibit bibitnya sudah ada sejak awal. Meskipun UKM PIB sudah dibentuk di Unnes tetapi keberadaan KSP masih tetap seperti biasa dibawah Hima. Hal ini seperti yang dijelaskan Pak Noorochmat Isdaryanto selaku Pembina UKM PIB UNNES:

"Jadi sebelumnya di unnes khususnya di jurusan pkn prodi pkn di hima itu sudah ada yang namanya KSP kelompok studi pancasila dibawah hima jadi sebelumnya itu sudah ada ya pertama akademik yang memang membahas pancasila ya jadi memang jurusan yang memang membahas pancasila kedua mahasiswanya sudah memiliki kelompok studi pancasila di bawah hima tentu cakupannya hanya sebatas kepada mahasiswa jurusan padahal pancasila ini untuk seluruhnya sehingga secara keorganisasian ksp dianggap kurang. Jadi sebelumnya sudah ada bibitnya yang bernama kelompok studi pancasila tetapi hanya terbatas di jurusan untuk lebih efektif dan efisien dalam tujuan mensosialisasikan pancasila kepada seluruh mahasiswa akan lebih baik kalau tingkatnya tingkat universitas. Itu keinginan lama sebetulnya sebelum ada PP 55. Begitu PP 55 terdengar ditempat kami kami menyambut baik sehingga apa yang sudah ada, bibit bibit yang ada itu dikumpulkan jadi sosialisasi dari menteri waktu itu tanggal 29 tgl 2 hari jumat kita langsung mendeklarasikan ukmpib namanya pe<mark>rsis seperti nam</mark>a disitu namanya persis. Jadi ukmpib ini dibentuk sebenernya bibitnya sudah cukup lama sesuai de<mark>ng</mark>an tradisi akademiknya ppkn atau pkn unnes dan dimahasiswa itu sudah ada kelompok studi pancasila sebelum ada ukmpib pancasila setelah ukmpib pancasila dibentuk ksp nya tetap tetap dibawah binaan hima itu."87

Hal ini sesuai dengan keterangan dari Muchamad Aulia Arifin sebagai Ketua UKM PIB UNNES 2018-2019 dimana dia mengatakan bahwa UKM PIB UNNES ini berawal dari sudah adanya KSP di prodi PPKn dengan didukung oleh dosen dosen PKn dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Karakter Bangsa (P3KB) Unnes.

"Berawal dari sudah adanya komunitas studi pancasila (KSP) di prodi PPKn unnes, setelah itu ada permendikti no. 55 tahun 2018. Maka dari itu dengan didukung oleh dosen dosen

.

⁸⁷ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 Juni 2020.

jurusan PKn dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Karakter Bangsa (P3KB) UNNES dibentuklah UKM PIB unnes".⁸⁸

Secara lebih detail Ilham Basuki Pantja (Ketua UKM PIB 2019-2020) menjelaskan awal mula terbentuknya UKM PIB UNNES sebagai berikut:

"Jadi dulu kan setelah mendapat permendikti itu trus pak nor langsung menginstruksikan ke jurusan minta ngumpulin anak anak gitu trus anak anak ppkn 2 angkatan dulu angkatan 17 sama 16 trus langsung kumpul mendeklarasikan yang mau membuat ukmpib lah trus setelah deklarasi itu langsung dibuat struktur langsung ada ketua wakil dan lain lain setelah itu berjalan sampai sekarang mas" 189

Deklarasi UKM PIB UNNES dilakukan pada tanggal 2
November 2018 pada hari jum'at tepatnya dilakukan setelah ibadah Jum'atan. Dalam deklarasi tersebut terdapat susunan acara yang diantaranya adalah menyanyikan lagu indonesia raya, pembacaan pancasila, deklarasi, dan juga sambutan dari pak Noorochmat sebagai Pembina. Hadir juga dalam Deklarasi itu perwakilan mahasiswa ppkn tahun 2016 dan 2017, Hima ppkn, perwakilan dari KSP, dari perwakilan luar ada Ukm Pramuka dan Menwa. Seperti yang disampaikan oleh pak Noorochmat sebagai berikut:

"Ini susunan acara waktu itu ya, ini susunan acara waktu deklarasi tertanggal 2 november hari jumat

⁸⁸ Muchamad Aulia Arifin, Wawancara oleh penulis, 24 Februari 2020.

⁸⁹ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

dideklarasikan setelah jumatan ada susunan acara menyanyikan lagu indonesia raya, pembacaan pancasila, deklarasi, sambutan dari pak noorochmat saya sendiri, nah itu sebelum deklarasi itu mahasiswa ppkn dalam mata kuliah civic education, ya mata kuliah civic education saya sosialisasikan peraturan tentang ristekdikti terkait dengan ukmpib dimata kuliah sebelum hari jumat itu dan kemudian saya memantik bagaimana kalau ksp yang sudah ada itu tetap dibentuk tetapi agar lebih luas jangkauannnya bagaimana kalau dibuat ukm nah ternyata itu disetujui sehingga tidak berapa lama gaada waktu seminggu ya dari hari senin eh sampai jumat itu, hari jumatnya langsung dideklarasikan wakil deklarasi ini ada angkatan yang kebetulan ini ya ada perwakilan ppkn 2016 2017 ada hima ppkn ada perwakilan dari ksp ya kemudian ada perwakila<mark>n dari luar arti</mark>nya mahasiswa selain dari ppkn atau pkn dari fis da<mark>n ada ukm</mark> lain dalam hal ini adalah pramuka dan menwa ya pramuka dan menwa untuk me apa itu me istilahnya mengadopsi atau menerima beberapa hal bahwa ukm ini keanggotaannya terbuka, artinya orang yang sudah terlibat didalam organisasi kemahasiswaan bisa ikut atau bahkan organisasi luar yang resmi, yang resmi dalam hal ini adalah ukm di unnes. Yang bergabung waktu itu adalah pramuka dan menwa dan itu ada fotonya". 90

Namun meskipun begitu Ilham Basuki Pantja mengakui bahwa dalam pembentukan UKM PIB mendapatkan protes dari berbagai Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di unnes, yang pada intinya Organisasi Mahasiswa Ekstra ini menganggap bahwa UKM PIB ini nantinya akan masuk ke dalam Organisasi

⁹⁰ Pak Norochmat, Wawancara oleh penulis, 3 Juni 2020.

mereka dan akan menilai apakah Organisasi Mahasiswa Ekstra ini radikal apa tidak, seperti pernyataan berikut:

"Ya kemaren pertama tama juga diprotes, pib diprotes sama itu organisasi ekstra hmi, pmii dan kawan kawan lah akhirnya buatlah kita kayak maksudnya mempertanyakan loh ini mau buat apa apaan yakan dikiranya pib kan kalau menurut permen kan suruh buat pembinaan, klo di unnes kan kita buatnya pengawal ideology bangsa namanya dikiranya sama organisasi ekstra itu kita mau masuk ke organisasinya dia kita mau melihat lihat ini sudah radikal apa belum, dikiranya seperti itu akhirnya mereka kayak minta keterangan lah ini gimana ini maksudnya gimana ini kok tau tau ada gini gini akhirnya kita buatlah diskusi kita mengundang semua ormek dan umum kalau mau ikut semua dari bem ikut semua disitu dijelaskan" 19

2. Proses Recrutmen dan Pemilihan Ketua

Untuk rekrutmen anggota UKM PIB dilakukan sebelum pemilihan ketua, dimana untuk proses rekrutmen anggota UKM PIB 2019-2020 ini pada awalnya adalah calon anggota di suruh membuat Essay tentang Pancasila namun pada akhirnya dibatalkan karena banyak yang memprotes dari calon anggota tersbut yang mau bergabung, hingga akhirnya proses rekrutmen disepakati hanya melalui Wawancara tatap muka dan yang mendaftar semua diloloskan menjadi anggota UKM PIB UNNES dengan pertimbangan bahwa yang dibutuhkan untuk

⁹¹ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

saat ini adalah fokus mencari anggota dulu dan juga meluaskan UKM PIB ini agar dikenal luas di dalam kampus. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mas Ilham Basuki Pantja:

"Rekrutmen sebelum pemilihan ketua, pertama kan suruh bawa itu dulu suruh buat essay tiba tiba rencananya gausah soalnya banyak yang complain maksudnya kita mau ikut katanya dari temen temen loh suruh buat essay katanya pada males ya enggaklah besok langsung aja berangkat wawancara tapi memang sebenernya kita yang dibutuhkan secara cari anggota dulu sama pengen apa ya meluaskan biar tau, sekarang paling yang tau pasti FIS lah di fakultas fakultas lain yang tau ya paling ya yang ikut organisasi klo mahasiswa lain saya yakin masih banyak yang belom tau pib itu apa, kemaren engga ada yang ga lolos langsung" 92

Sementara untuk pemilihan Ketua UKM PIB sendiri dilakukan secara demokratis, melalui musyawarah dengan mekanisme beberapa kandidat calon ketua menyampaikan visi misi dan kesanggupannya, lalu disortir hingga menjadi 3 kandidat. Hingga akhirnya 3 kandidat ini di suruh keluar dari forum untuk sementara, lalu peserta forum melakukan musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua, jadi pemilihan ketua benar benar melalui mekanisme Musyawarah dan bukan melalui Voting. Juga benar benar dilakukan murni oleh anggota UKM PIB tanpa campur tangan

92 Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

Pembina sama sekali, seperti yang disampaikan mas Ilham Basuki Pantja berikut:

"Klo ketua itu demokrasi apa kaya musyawarah pancasila kita selalu pakainya itu, tentang pemilihannya jadi kan ada kandidat-kandidat beberapa orang missal dari pertama kan ada sepuluh atau berapa terus disitu kaya bilanglah aku ginhi gini gini ya visi misi kaya sanggup apa engga dan terus disitu juga orang-orang anggota ketua ini diskusi ini gimana layak apa engga trus di sortir terus disortir terus sampe tiga setelah tiga, tiga itu keluar dari forum forum itu diskusi jadi bener-bener kita musyawarah kita jarang gapernah kalau ppkn itu ga voting kalau voting itu karena di kita loh voting itu gajadilah kalau voting ga bener bener itu, yang tiga tadi keluar gatau sama sekali, trus tau tau masuk lagi kita ke forum trus udah ini berdasarkan forum yang jadi ini gitu seperti itu, dan pemilihan ketua ukmpib tanpa campur tangan Pembina ukmpib sama sekali murni oleh mahasiswa" "93"

3. Laporan Kegiatan UKM PIB UNNES

Berikut merupakan Laporan Kegiatan UKM PIB UNNES Tahun 2018-2019 dengan jumlah 11 kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun dana yang telah dikeluarkan mencapai Rp. 3.427.000:

Tabel 4.8 Laporan Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU	DANA
		PELAKSANAAN	

⁹³ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

-

	1.	Temu Perdana dan	Sabtu, 2 Februari	200.000
		Rapat Kerja UKM	2019 Pukul 08;00	
		PIB UNNES 2019	WIB s.d selesai	
	2.	Open Recruitment	Minggu, 26	-
		Anggota UKM PIB	Februari 2019	
		2019		
	3.	Seminar Penguatan	Kamis, 28	100.000
		Ideologi Pancasila	Februari 2019	
		_/	Pukul 09:00 sd	
			selesai	
	4.	Kajian Best	Jumat, 29 Maret	100.000
		Practice	2019 Pukul 13.00	
	6	"Nasionalisme,	WIB s.d selesai	8
		Be <mark>lan</mark> egara dan		
11		Ke <mark>di</mark> siplinan"		
		Be <mark>kerjasama</mark>		
		dengan P3KB		
		(Pusat Pengkajian		
		Pancasila dan		
		Karakter Bangsa)		
		UNNES dan		
		Resimen		
		Mahasiswa Batlyon		
		902 UNNES		
	5.	Peringatan Hari	Jumat, 24 Mei	50.000
		Besar Nasional	2019 Pukul 09:00	
		(Hari Kebangkitan	sd selesai	
		Nasional)		
	6.	Pelatihan Lempar	Minggu, 26 Mei	50.000
		Pisau dan Kapak	2019 Pukul 16:00	
L				

_			
		(Lempika)	WIB s.d selesai
	7.	Kongres Pancasila	15 – 16 Agustus 1.000.000
		di UGM	2019
	8.	UKM PIB UNNES	9 - 10 September 300.000
		Fair	2019
	9.	Pengabdian	29 September 1.354.500
		Masyarakat	2019
		Penguatan Karakter	Pukul 13:00 WIB
		Pancasila Anak-	s.d selesai
		anak Desa	
		Deli <mark>ksari Se</mark> marang	
		Melalui B <mark>MW</mark> 100	
1		Karakter	
	10.	Open Recruitment	1 Desember 2019 -
1		Anggota UKM PIB	
1		UNNES 2020	
	11.	Musyawarah Besar	22 Desember 2019 272.500
		UKM PIB UNNES	
		2019	

Sumber: Data UKM PIB Unnes.

Untuk anggaran di UKM PIB UNNES sudah ditetapkan oleh Universitas dimana rata-rata UKM itu akan diberikan besaran anggaran yang sama kecuali besar kecilnya UKM dan jenis UKM. Lalu UKM PIB UNNES selain mendapatkan dana dari kampus juga mendapatkan support dari pak Noorochmat sebagai Pembina UKM PIB UNNES lewat dana Pengabdian

Dosen. Jadi oleh pak Noorochmat diambilkan dana dari Pengabdian untuk kemudian berkolaborasi dengan UKM PIB melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dananya didanai oleh Fakultas. Seperti keterangan berikut:

"Anggaran pertama kemahasiswaan di unnes untuk anggran sudah ditetapkan oleh universitas ya dan rata rata tiap ukm itu akan diberikan yang sama kecuali besar kecilnya ukm dan jenis ukm misalnya untuk marcing band butuh alat ya tentu lebih besar dan sebagainya sudah dijatah diberikan universitas dan itu kemudian saya support secara pribadi karena posi<mark>si sa</mark>ya seba<mark>gai</mark> pembinan ukmpib melalui dana penelitian dosen, jadi saya ulangi melalui dana pengabdian dosen, jadi ada dana pengabdian yang atas nama dosen kemudian saya ajak mahasiswa ukmpib untuk membuat program pengabdian itu sehingga ukmpib untuk tahun kemaren itu mendapatkan dana ya dari universitas dari bantingan anggota karena ada beberapa kegiatan itu yang anggota itu bantingan misalkan beli eh teh membeli gorengan dsb ketika mereka rapat itu sendiri kemudian dari Pembina ukmp dalam hal ini mengambilkan dana dari pengabdian karena kemudian ukmpib kolaborasi dengan Pembina melakukan pengabdian masyarakat yang dananya didanai oleh fakultas begitu"94

Lalu mas Ilham Basuki Pantja sebagai ketua UKM PIB menambahkan bahwa anggaran UKM PIB UNNES sekitar 4 juta dan jika kurang bisa bertambah hingga maksimal 8 juta,

_

⁹⁴ Noorochmat, Wawancara oleh penulis , 3 juni 2020.

hal ini karena menurutnya ada dana minimal dan ada dana maksimal, ada dana tetap dan juga dana tambahan. Seperti keterangan berikut:

"Tapi ada anggaran per ukm gitu, tapi kita kalau mau nambah gitu kaya ada dana minimal ada dana maksimal, kalau kita ininih proposalnya kalau proposalnya apa ketrima atau acc bisa ditambahin, ada dana yg tetap ada dana tambahan , kmarin baru nyinggung nyinggung lah pak nor katanya sih sekitar 4 jutaan bisa nambah maksimalnya 8 lah" 95

_

⁹⁵ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

b. Univeristas Semarang

1. Sejarah Pembentukan UKM PIB USM

Gambar 4.2 Deklarasi Pendirian UKM PIB USM



UKM PIB USM merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme Universitas Semarang berdasarkan instruksi langsung dari Prof. Dr. H. Muladi, S.H. selaku Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro. UKM PIB di USM dideklarasikan pada tanggal 5 Desember 2018 di Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diketuai oleh Robiatul Adawiyah dengan Tri Mulyani, Spd., S.H., M.H. sebagai pembimbing. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bu Tri Mulyani sebagai Pembimbing maupun Pembina UKM PIB USM:

"Secara historis, UKM PIB merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme Universitas Semarang berdasarkan instruksi langsung oleh Prof. Dr. H. Muladi, S.H. selaku Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro. UKM PIB ini dideklarasikan pada tanggal 05 Desember 2018 di Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diketuai oleh Robiatul Adawiyah dengan Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H. sebagai pembimbing dan Dr. Mochamad Chaerul Latif, M.Si., Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H., dan Ade Adriansyah, A.Md., S.T., M.H. sebagai penasihat."96

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan mbak Choerunnisak sebagai Ketua UKM PIB dimana dia juga mengatakan bahwa Prof. Muladi ingin agar UKM PIB di USM ini dibentuk 1 bulan setelah Permennya keluar, seperti keterangan berikut:

"Karena ukmpib ini dari itu hasil dari pengkajian dari klo di usm kan ada pusat riset kajian terorisme dan radikalisme itu ada pak jun junaidi nah itu pertama kali itu yang mbentuk pak jun bu tri mbak rubi karena yang tau seluk beluk pembentukan ukm disinikan saya jadi saya juga masuk di pembentukan itu jadi yang awal pembentuk itu 4 orang itu awalnya memang dari saran prof. muladi minta dibentuk pokoknya langsung dadakan 1 bulan itu jadi ukm setelah permen.nya keluar langsung kita disuruh buat ukm" pokoknya langsung kita disuruh buat ukm

UKM PIB USM merupakan organisasi di perguruan tinggi yang lahir sebagai amanah dari Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa. Hal itu

⁹⁷ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

.

⁹⁶ Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

kemudian yang menyebabkan UKM PIB dalam pendiriannya berbeda dengan UKM pada umumnya mengingat adanya asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan akan berlaku sejak dikeluarkan, seperti keterangan berikut:

"Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa Universitas Semarang (UKM PIB USM) merupakan organisasi di perguruan tinggi yang lahir sebagai amanah dari Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa. Oleh karena itu, UKM PIB dalam pendirian berbeda dengan UKM pada umumnya mengingat adanya asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan akan berlaku langsung sejak dikeluarkan. Walaupun Universitas Semarang memiliki aturan tersendiri dalam pembentuka UKM baru, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri yang merupakan aturan lebih tinggi mengingat asas lex superiori de rogat legiin feriori." 98

Lebih lanjut Bu Tri Mulyani mengatakan bahwa UKM PIB merupakan organisasi yang penting bagi perguruan tinggi mengingat isu soal radikalisme dan terorisme yang telah masuk ke berbagai perguruan tinggi di indonesia, dimana hal itu menyebabkan kondisi masyarakat khususnya civitas akademik rentan akan ideologi Transnasional yang dapat mengancam keutuhan bangsa indonesia. Dikaitkan dengan kenyataan bahwa dalam tes CPNS kemarin, yaitu 80% peserta gagal karena wawasan kebangsaan. Sehingga kemudian organisasi ini

98 Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

_

memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar untuk membentengi negara dengan Pancasila khususnya perguruan tinggi dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa.

"UKM PIB merupakan organisasi yang penting bagi perguruan tinggi mengingat isu radikalisme dan terorisme yang telah masuk diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nampaknya era millennial maupun era digital ini telah menyebabkan kondisi masyarakat khususnya civitas akademik rentan akan ideology transnasional bahkan dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 dengan kecanggihan teknologi dan tipisnya batas antarnega<mark>ra.</mark> Dikaitkan dengan kenyataan bahwa terlihat dengan je<mark>las potret gener</mark>asi bangsa dalam tes CPNS kemarin, yaitu 80% peserta gagal karena wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, perguruan tinggi penting untuk melakukan pembinaan ideology bangsa dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara Republik Indonesia melalui pembentukan UKM PIB. Jadi, organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk membentengi negara dengan Pancasila khususnya perguruan tinggi dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang dalam waktu dekat mengambil estafet kepemimpinan."99

Meskipun UKM PIB telah terbentuk di USM namun dalam pendiriannya tidak berjalan lancar begitu saja, hal itu karena UKM PIB harus berjuang untuk mendapatkan

.

⁹⁹ Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

legalitasnya di USM, karena diputuskan oleh Wakil Rektor III pada saat itu bahwa UKM PIB hanya diakui secara de facto dan baru diakui secara de jure di dalam kampus setelah mengikuti Musyawarah Kerja (Musyker), yang berarti Pendanaan juga baru akan di danai oleh USM mulai tanggal terhitung ditetapkannya UKM ini secara de jure dalam musyker.

"Namun, pendiriannya juga tidak berjalan lancar begitu saja. UKM PIB juga berjuang untuk mendapatkan legalitasnya di Universitas Semarang karena diputuskan oleh Wakil Rektor III yang pada saat itu dijabat oleh Dr. Mochamad Chaerul Latif, M.Si. bahwa UKM PIB hanya diakui secara de facto dan baru akan diakui secara de jure di dalam kampus setelah mengikuti Musyawarah Kerja (Musker), sehingga pendanaan juga baru akan didanai oleh Universitas Semarang mulai tanggal terhitung ditetapkannya UKM ini secara de yure dalam Musker. Hal ini yang perlu diluruskan bahwa pada pokoknya UKM PIB USM telah memiliki landasan yuridis yang cukup, namun dalam pengimplementasiannya butuh penyesuaian dengan kondisi kampus agar menjaga ketenangan dan keharmonisan". 100

Choerunnisak juga menjelaskan bahwa ketika awal terbentuk UKM PIB tidak bisa langsung menjadi UKM, melainkan menjadi komunitas terlebih dahulu, lalu setelah itu berubah menjadi UKM ketika diperjuangkan melalui musyker diantara syarat-syaratnya adalah harus ada SK Rektornya, harus

¹⁰⁰ Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

disetujui oleh temen-temen UKM sama orma yang ada di USM, jadi memang ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi.

"Pas kebentuk karena kita gabisa langsung ukm jadi komunitas yang pertama itu di usm, kita untuk didalem kampus itu kita pake namanya komunitas tapi saat kita branding keluar kita ada hak istimewa disini jadi kita udah boleh pake nama ukm tapi untuk didalem kita masih mengikuti birokrasinya kampus, terus pas perubahan jadi ukm itu pas saya, saya yang memperjuangkan di musykernya, harus ada SK rektornya, harus disetujui sama temen temen ukm sama orma yang ada disini, jd ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, nah karena ketua sebelumnya Cuma menjabat 3 bulan ya hampir 4 bulan tapi karena memang mau wisuda kan jadi trus Cuma sebentar trus pergantian periode trus menyelesaikan program kerjanya sebentar trus bikin memenuhi persyaratan itu baru terbentuk ukm" 101

Dalam menjalankan Prokernya, UKM PIB USM juga melakukan kerja sama dengan pihak luar seperti Lemhanas dan juga Komnas Ham untuk membuat Pelatihan.

"Cuma ini kita mau ada tambahan kita gabungan sama lemhanas sama bagian komnas ham juga sama rumah pancasila disini, tambahan program kerja selain musyker, kita lebih sering kerja diluar juga, jadi ngajak yang pihak luar buat ngisi di usm buat pelatihan" 102

¹⁰² Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

¹⁰¹ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

2. Proses Rekrutmen dan Pemilihan Ketua

Proses rekrutmen anggota UKM PIB USM dilakukan dengan cara sosialisasi ke setiap fakultas lalu meminta setiap fakultas tersebut untuk mengirimkan delegasinya, juga tidak lupa berkoordinasi dengan Organisasi Ekstra Kampus seperti Hmi dan Pmii. Seperti yang diungkapkan oleh Choerunnisak berikut:

"Kita sosialisasi ke tiap fakultas trus kita minta untuk ada delegasi kemudian yang dari eksternal karena kita kan juga mencakupnya sama yang organisasi diluar kampus nah itu kita koordinasi sama ketua, kaya hmi, pmii".¹⁰³

Di UKM PIB USM ini tidak melakukan Rekrutmen secara terbuka karena baranggapan bahwa nantinya Mahasiswa yang baru mengerti UKM PIB akan menganggap UKM ini UKM yang berat sehingga untuk langkah awal alam mencari Anggota, UKM PIB melakukan Sosialisasi dengan masuk ke fakultas-fakultas dan menjelaskan ke mahasiswa tentang apa itu UKM PIB sehingga membuat mahasiswa nantinya mengerti dan paham apa itu UKM PIB. Seperti yang dikatakan oleh mbak Choerunnisak berikut:

"Kalau bikin rekrutmen pertama minat ya kedua takut orang kalau liat pib dari namanya aja itu mereka udah wah kelihatannya kayanya ukm yang berat nah jadi kita antisipasi

seperti itu kita langsung menuju ke fakultas fakultas itu kita jelasin, jadi waktu pertama kali masuk usm yang kedua waktu mereka sudah masuk ke organisasi tapi mungkin diperiode ke depan ada jadi calon dema sama calon presma itu harus mengikuti pelatihan yang ada di ukmpib terlebih dahulu sesuai dengan anjuran prof. muladi tapi masih kita godok buat, ya ngak sih ya ngak sih karena memang posisi mereka kan lebih tinggiklo kita yang mendidik kan juga pasti mereka mikir dua kali jadi masih mengkaji itu "104"

Untuk pemilihan ketua di UKM PIB USM dilakukan secara demokrasi dengan diadakannya pemilihan, dengan mekanisme dipilih beberapa Calon oleh Ketua oleh Anggota, Pembina, dan juga Penanggung Jawab UKM PIB USM, yang selanjutnya dari beberapa calon itu akan dipilih menjadi Ketua UKM PIB USM.

"Demokrasi kita ada pemilihan, jd ada beberapa calon, dipilih sama anggota, Pembina sama, pak jun itu ya bisa dibilang sebagai penanggung jawab lah pak jun itu di ukmpib ini, karena memang pembentuk pertama kan dari pak jun bu tri itu dari dosen 2 orang itu kemudian ketambahan lagi dari lemhanas kan ada pak ade, pak ade itu dari lemhanas yang juga mahaasiswa usm juga ambil s2 disini trus dari mahasiswanya itu saya sama mbak robi, klo mbak robi kan emang semester atas, diatas saya" 105

¹⁰⁴ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.105 Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

3. Laporan Kegiatan UKM PIB USM Tahun 2018-2019

UKM PIB USM memiliki 6 Kegiatan yang sudah dilakukan hingga bulan maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembentukan

Kegiatan ini Dilakukan pada 5 desember 2018 dengan tempat di Polda Jawa Tengah dimana kegiatannya adalah bersama dengan Pejabat Pembina yayasan, Pengurus yayasan, dan Universitas Semarang Mendeklarasikan UKM PIB USM dan dikenalkan kepada jajaran kepolisian di Jateng dengan Dana dibebankan pada Universitas Semarang.

2. Kunjungan

Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 dengan tempat di Rumah Pancasila dimana kegiatannya adalah menjalin relasi dan kerjasama. Telah diwujudkan dalam keikutsertaan rumah pancasila dalam penyuluhan bersama UKM PIB dan bantuan publikasi Live Streaming Semarang TV dalam kegiatan Seminar dengan Dana dibebankan pada Pribadi.

3. Penyuluhan Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan pada 22 Januari 2019 dengan tempat di SMPN 29 Semarang, dimana UKM PIB USM bekerjasama dengan KKN USM dalam rangka penyuluhan dengan tema *Hoax* (Perspektif Pancasila) dimana Dana dibebankan pada Relasi.

4. Penyuluhan Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan pada 3 Februari 2019 dengan tempat di Kelurahan Bulusan, dimana UKM PIB USM bekerjasama dengan KKN USM menggait Rumah Pancasila dalam rangka Penyuluhan dengan tema Pemilu (Perspektif Pancasila) dengan Dana dibebankan pada Sponsor.

5. Penyuluhan Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan pada 2 Maret 2019 dengan tempat di SMA Islam Sultan Agung, dimana UKM PIB USM bekerjasama dengan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam rangka penyuluhan dengan tema Pengawasan Etik Hakim (Perspektif Pancasila) dengan Dana dibebankan pada Sponsor dan Pribadi.

6. Seminar Nasional

Kegiatan ini dilakukan pada 16 Maret 2019 dengan tempat di Gedung V USM, dimana Sebagai inisiator bagian dari kepanitiaan bersama Yayasan Alumni UNDIP dan Universitas Semarang dengan bangga menyelen garakan sebagai ajang pengabdian masyarakat dan perkenalan USM sebagai kampus wawasan kebangsaan yang telah memiliki

juga UKM PIB. Selain itu dalam proses dibangun relasi dengan IKAL LEMHANAS Jateng, dimana Dana dibebankan pada Yayasan.¹⁰⁶

Untuk anggaran terkait program kerja UKM PIB
USM mendapatkan Rp. 500.00 yang didapat dari
Universitas melalui Musyawarah kerja dan anggarannya
bisa diambil ketika Program kerja dijalankan, seperti
keterangan bu Tri Mulyani berikut:

"Untuk anggaran ukmpib mendpatkan 500 ribu dan itu dipergunakan untuk program kerja ukm, dan anggaran tersebut didapatkan dari universitas melalui musyawarah kerja orma/ukm di usm dan anggarannya diambil ketika proker akan dijalankan" 107

Dari berbagai keterangan yang sudah didapatkan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan UKM PIB baik di Unnes dan juga Usm sebagai bentuk Implementasi dari Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik dan juga sebagaimana mestinya. Dimana dari sejak peraturan itu dikeluarkan pada tangal 26 oktober 2018 yang sudah dilakukukan oleh Unnes yaitu langsung mendeklarasikan UKM PIB Unnes pada tanggal 2 November 2019 atau hanya berselang satu minggu saja sejak peraturan itu dikeluarkan, setelah itu langsung membentuk struktur kepengurusan UKM PIB,

.

¹⁰⁶ Data UKM PIB USM.

¹⁰⁷ Tri mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

membentuk AD/ART, membentuk program kerja dan melaksanakan program kerja yaitu berupa seminar maupun kajian tentang Pancasila dan juga pengabdian kepada masyarakat, juga sudah mendapatkan anggaran dari kampus dalam rangka mendukung program kerja yang sudah ditetapkan dan terakhir juga sudah melakukan regenerasi kepengurusan dan serta melaporkan Laporan pertanggung jawaban di akhir kepempinan maupun akhir periode dalam bentuk Musyawarah Besar.

Di USM UKM PIB dideklarasikan pada tanggal 5 Desember 2018 atas instruksi langsung dari Prof. Muladi selaku Ketua Pembina Alumni Universitas Diponegoro, setelah itu membentuk struktur kepengurusan, AD/ART, dan juga membentuk serta melaksanakan Program Kerja, selain itu juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar seperti Komnas Ham dan Lemhanas dalam melakukan Pelatihan di Usm, juga sudah mendapatkan anggaran dari kampus dalam rangka mendukung program kerja yang sudah ditetapkan, serta melaporkan Laporan pertanggung jawaban di akhir kepemimpinan maupun akhir periode dalam bentuk Musyawarah Besar.

Analisis

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di UNNES dan USM, penulis menggunakan Teori dari George Edward III, yang menggunakan model pendekatan *Top Down*. Dalam pendekatan *Top Down* Implementasi Kebijakan yang dilakukan bersifat tersentralisir dan dimulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *Top Down* bertitik tolak dari pandangan bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh admisitratoradministrator maupun birokrat-biroktat pada level dibawahnya. Jadi inti dari pendekatan Top Down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan tingkat pusat. ¹⁰⁸

George Edward III menjelaskan ada 4 faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu Communication (Komunikasi), Resources (Seumber Daya), Dispotisions or attitude (Sikap), dan juga Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). 109

1. Communication (Komunikasi)

Implementasi bisa efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Sumberdaya pegetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat. Selain itu, kebijakan

¹⁰⁸ Andrianto, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN, dan MAN Di Kabupaten Tangerang" (Skripsi, Untirta Banten, 2017) diakses 25 juni 2020.

¹⁰⁹ Silitonga, *Implementasi Kebijakan*, 30-34

yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan.

Dalam pembentukan hingga pelaksanaan UKM PIB hingga hari ini baik di UNNES maupun di USM yang terus dilakukan adalah menjalin Komunikasi yang baik antara UKM PIB sebagai Pelaksana kebijakan maupun Implementator dengan Mahasiswa sebagai Tujuan maupun Sasaran. Hal ini perlu dilakukan agar UKM PIB dikenal secara luas dilingkungan kampus dan juga menjaga eksistensi dari UKM PIB ini sendiri agar tetap ada dan semakin besar dari waktu ke waktu. Seperti yang dikatakan oleh Ilham Basuki Pantja sebagai ketua dari UKM PIB UNNES, dia mengatakan bahwa untuk sekarang yang dibutuhkan adalah meluaskan UKM PIB ini agar dikenal dan diketahui oleh mahasiswa di UNNES karena dia beranggapan bahwa untuk saat ini masih banyak yang belum tau terhadap UKM PIB, seperti keterangan berikut:

"...memang sebenernya kita yang dibutuhkan secara cari anggota dulu sama pengen apa ya meluaskan biar tau, sekarang paling yang tau pasti FIS lah di fakultas fakultas lain yang tau ya paling ya yang ikut organisasi klo mahasiswa lain saya yakin masih banyak yang belom tau pib itu apa, mungkin juga kegiatan setaun kemaren juga masih belum kelihatan masih ya dikitlah "110"

Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Choerunnisak sebagai Ketua UKM PIB USM, dia mengatakan bahwa UKM PIB USM melakukan Komunikasi dengan cara sosialisasi ke setiap fakultas untuk menjelaskan UKM PIB lalu meminta untuk ada delegasi dari tiap fakultas, selain itu juga sudah melakukan koordinasi dengan organisasi luar kampus seperti HMI dan PMII karena itu juga merupakan cakupannya, seperti keterangan berikut:

"kita sosialisasi ke tiap fakultas trus kita minta untuk ada delegasi kemudian yang dari eksternal karena kita kan juga mencakupnya sama yang organisasi diluar kampus nah itu kita koordinasi sama ketua, kaya hmi, pmii"¹¹¹

"...or<mark>ang kalau liat p</mark>ib da<mark>ri</mark> namanya aja itu mereka udah wah kelihatannya kayanya ukm yang berat nah jadi kita antisipasi seperti itu kita langsung menuju ke fakultas fakultas itu kita jelasin"¹¹²

Sementara Tri Mulyani Sebagai Pembina UKM PIB USM mengatakan bahwa UKM PIB USM sendiri masih mencoba mencari dan menggali power untuk menunjukan identitas terlebih dahulu, seperti keterangan berikut:

"kami dari UKM PIB sendiri masih mencoba mencari dan menggali power untuk menunjukan identitas dari UKM kami terlebih dahulu. Agar orang-orang yang lain mampu menilai dan

.

¹¹⁰ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹¹¹ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

¹¹² Choerunnisak, Wawancara oleh penulis 20 maret 2020.

memahami kita bukan sebagai organisasi garis keras dengan keistimewaan yang kami miliki"¹¹³

2. Resources (Sumber Daya)

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah Staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadahi ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, akan tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Sumber Daya dalam UKM PIB ini adalah Staf atau Anggota dari UKM PIB itu sendiri, dimana baik di UNNES maupun USM telah melakukan Rekrutmen anggota agar UKM PIB ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan, dimana anggota disini mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan dan juga menjalankan fungsi dari UKM PIB. Seperti yang dikatakan oleh Ilham Basuki Pantja, dia mengatakan bahwa pada awalnya proses rekrutmen syaratnya harus membuat essay terlebih dahulu tetapi karena banyak yang memprotes akhirnya syarat itu dihilangkan dan hanya menjadi wawancara

¹¹³ Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

saja, karena memang yang dibutuhkan adalah mencari anggota terlebih dahulu. Seperti keterangan berikut

"Rekrutmen sebelum pemilihan ketua, pertama kan suruh bawa itu dulu suruh buat essay tiba tiba rencananya gausah soalnya banyak yang complain maksudnya kita mau ikut katanya dari temen temen loh suruh buat essay katanya pada males ya enggaklah besok langsung aja berangkat wawancara tapi memang sebenernya kita yang dibutuhkan secara cari anggota dulu..." 114

Sementara di USM rekrutmen tidak diadakan secara langsung untuk sementara waktu seperti yang dilakukan di UNNES, tetapi rekrutmen dilakukan dengan cara perwakilan dari setiap fakultas, lalu mengajak koordinasi dengan Organisasi mahasiswa ekstra untuk bergabung, dan sudah ada 1 orang mahasiswa dari GMNI yang sudah bergabung dengan UKM PIB USM, Seperti keterangan berikut Choerunnisak dan juga Aldi berikut:

"kita sosialisasi ke tiap fakultas trus kita minta untuk ada delegasi kemudian yang dari eksternal karena kita kan juga mencakupnya sama yang organisasi diluar kampus nah itu kita koordinasi sama ketua, kaya hmi, pmii" 115

¹¹⁴Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹¹⁵ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

"...Kalo sependek pengetahuan saya baru kawan saya anak gmni bung, baru satu orang soalnya ukmpib setahu saya juga baru merintis..." 116

3. Dispotisions or Attitude (Sikap)

Yang dimaksud disposisi disini yaitu sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

UKM PIB dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan harus mengerti apa yang akan dilakukan agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan efektif. Seperti yang dikatakan oleh Ilham Basuki Pantja sebagai ketua UKM PIB UNNES, bahwa UKM PIB UNNES dalam prakteknya adalah melakukan kajian maupun diskusi tentang Pancasila agar mahasiswa semakin tau lebih dalam tentang pancasila, dan juga turun ke masyarakat membuat acara dengan anak-anak untuk mengajar Pancasila, seperti keterangan berikut:

"...sebenernya kita itu cuma istilahnya kaya mengkaji tentang pancasila kaya pembinaan, kaya historisnya kaya konsepnya apanya tentang pancasila dan kita gabakal gabakal dipikiran mereka mau masuk kayak apa gabakal dan kita sebenernya malah pengennya itu kaya mahasiswa mahasiswa itu

.

¹¹⁶ Aldi, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020.

ya gabung ke kita itu supaya tambah dalam tambah tau tentang pancasila gitu" ¹¹⁷

"Tapi kalo sementara sekarang klo yg pib yang di unnes ini ya Cuma sebatas gitu aja mengkaji kaji tentang pancasila, diskusi, turun ke masyarakat buat itu kayak ke desa kaya buat acara sama anak-anak kecil gitu tentang mengajar pancasila gitu" ¹¹⁸

UKM PIB UNNES menurut saya juga memiliki modal yang kuat dalam melaksanakan program dari UKM PIB dalam rangka pembinaan ideologi pancasila kepada mahasiswa karena anggota dari UKM PIB UNNES yang mayoritas hampir sekitar 80% anggotanya adalah dari jurusan PKn. Hal ini tentu menjadi modal yang bagus dimana mahasiswa Pkn pada umumnya sudah terbiasa dan banyak mengerti ketika berbicara mengenai Ideologi, Nasionalisme, dan juga Pancasila. Seperti keterangan berikut:

"...juga kebanyakan mayoritas hampir 80 persen juga masih dari jurusan PKn kemudian ya belum terlalu menjangkau ke fakultas fakultas lain lah kan pengennya ini menjadi apa ukm yang tingkatnya univ tapi belum..." "119

Sementara Tri Mulyani sebagai Pembina UKM PIB Unnes mengatakan bahwa UKM PIB merupakan organisasi yang penting, mengingat isu radikalisme dan terorisme yang telah masuk diberbagai perguruan tinggi, sehingga UKM PIB ini memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk membentengi negara

¹¹⁷ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹¹⁸ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹¹⁹ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 28 juni 2020.

dengan pancasila, khususnya untuk perguruan tinggi dan juga mahasiswa, seperti keterangan berikut:

"ukmpib merupakan organisasi yang penting bagi perguruan tinggi mengingat isu radikalisme dan terorisme yang telah masuk diberbagai perguruan tinggi di Indonesia..." ¹²⁰

"...jadi, organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk membentengi negara dengan Pancasila khususnya perguruan tinggi dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang dalam waktu dekat mengambil estafet kepemimpinan" 121

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Kebijakan publik yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang atau banyak pihak yang terkait, bila struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jelannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

UKM PIB tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Birokrasi kampus, karena Birokrasi kampus banyak terlibat dalam pembentukan UKM PIB, seperti yang mengusulkan, yang memerintahkan dan juga membeikan legalitas kepada UKM PIB

_

¹²⁰ Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

¹²¹ Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

disebuah kampus. Ketika sudah dibentuk, Kampus juga harus memberikan dukungan penuh kepada UKM PIB agar bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya seperti dukungan financial, tempat, dan lainnya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pak Noorochmat sebagai Pembina UKM PIB UNNES dimana dia mengatakan setelah Permenristekdikti itu keluar, kampus menyambut baik peraturan tersebut dengan langsung mendeklarasikan UKM PIB Unnes pada tanggal 2 oktober 2018 atau hanya berselang seminggu setelah peraturan itu dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, dan juga UKM PIB ini sudah disetujui oleh Rektor, dengan dikeluarkannya SK Rektor yang mengatakan bahwa UKM PIB merupakan UKM yang legal di UNNES, seperti keterangan berikut:

"...Begitu PP 55 terdengar ditempat kami kami menyambut baik sehingga apa yang sudah ada bibit bibit yang ada itu dikumpulkan jadi sosialisasi dari menteri waktu itu tanggal 29 tgl 2 hari jumat kita langsung mendeklarasikan ukmpib namanya persis seperti nama disitu namanya persis ini susunan acara waktu itu ya, ini susunan acara waktu deklarasi tertanggal 2 november hari jumat dideklarasikan setelah jumatan..." 122

"...dan pada tahun itu juga ada 2019 maksudnya disetujui oleh rektor ya sekali lagi ada sk rektornya setelah dideklarasikan

¹²² Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

pasti ada tata keorganisasian ini surat dari rektor yang menyatakan bahwa ukmpib itu ukm yang legal di unnes..."¹²³

Muchamad Aulia Arifin menjelaskan bahwa pembentukan UKM PIB di UNNES di dukung oleh dosen dosen jurusan PKn dan juga Pusat pengkajian pancasila dan karakter bangsa (P3KB), seperti keterangan berikut:

"Berawal dari sudah adanya komunitas studi pancasila (KSP) di prodi PPKn unnes, setelah itu ada permendikti no. 55 tahun 2018. Maka dari itu dengan didukung oleh dosen dosen jurusan PKn dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Karakter Bangsa (P3KB) UNNES dibentuklah UKM PIB unnes". 124

Pak Noorochmat juga menjelaskan mengenai anggaran yang sudah ditetapkan oleh universitas untuk setiap UKM, termasuk untuk UKM PIB seperti keterangan berikut:

"Anggaran pertama kemahasiswaan di unnes untuk anggran sudah ditetapkan oleh universitas ya dan rata rata tiap ukm itu akan diberikan yang sama kecuali besar kecilnya ukm dan jenis ukm misalnya untuk marcing band butuh alat ya tentu lebih besar dan sebagainya sudah dijatah diberikan universitas" 125

Hal serupa juga dikatakan oleh Ilham Basuki Pantja dimana dia menjelaskan anggaran untuk UKM PIB sekitar 4 juta rupiah dan bisa bertambah hingga 8 juta rupiah, seperti keterangan berikut:

٠

¹²³ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

¹²⁴ Muchamad Aulia Arifin, Wawancara oleh penulis, 24 Februari 2020.

¹²⁵ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

"Tapi ada anggaran per ukm gitu, tapi kita kalau mau nambah gitu kaya ada dana minimal ada dana maksimal, kalau kita ininih propsalnya kalau proposalnya apa ketrima atau acc bisa ditambahin, ada dana yg tetap ada dana tambahan kemarin baru nyinggung nyinggung lah pak nor katanya sih sekitar 4 jutaan bisa nambah maksimalnya 8 lah" 126

Sementara di USM Tri Mulyani mengatakan bahwa pembentukan UKM PIB USM atas instruksi langsung Prof. Muladi sebagai ketua dewan Pembina yayasan alumni universitas diponegoro, seperti keterangan berikut:

"Secara historis, UKM PIB merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme Universitas Semarang berdasarkan instruksi langsung oleh Prof. Dr. H. Muladi, S.H. selaku Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro"

Hal serupa juga dikatakan oleh Choerunnisak, seperti keterangan berikut:

"awalnya memang dari saran prof. muladi minta dibentuk pokoknya langsung dadakan l bulan itu jadi ukm setelah permen.nya keluar langsung kita disuruh buat ukm" 127

Mengenai Anggaran Tri Mulyani mengatakan bahwa UKM PIB USM mendapatkan anggaran sebesar 500 ribu rupiah dan uang dipergunakan untuk program kerja UKM, seperti keterangan berikut:

"Untuk anggaran ukmpib mendpatkan 500 ribu dan itu dipergunakan untuk program kerja ukm, dan anggaran tersebut

¹²⁶ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹²⁷ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

didapatkan dari universitas melalui musyawarah kerja orma/ukm di usm dan anggarannya diambil ketika proker akan dijalankan"¹²⁸

Hal serupa juga dikataka oleh Choerunnisak dimana dia mengatakan bahwa karena telah menjadi UKM, maka UKM PIB sudah mendapatkan anggaran sendiri dari kampus, seperti keterangan berikut:

"anggaran kita ada anggaran dari kampus jadi kita karena udah ukm kita ada anggaran sendiri dari kampus tapi memang tidak sebanyak ukm yang lain tapi sudah ada anggaran jadi harus kita pengajuan dulu walaupun kita udah tau dapet berapa tapi kita harus pengajuan dulu diberikan bagian keuangan" 129

Jadi Implementasi kebijakan dalam Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di UNNES dan juga USM bersifat Non Self-Executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan bisa tercapai. Berbeda dengan yang bersifat Self-Executing yang berarti bahwa dengan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalkan pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. 130

¹²⁹ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

¹²⁸ Tri mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

¹³⁰ Mala Antika, "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pembangunan Industri Kecil dan Menengah di Desa Sidodadi kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang" (Skripsi, Uinsu Medan, 2017), diakses 17 juli 2020.

2. Efektivitas Penerapan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018

a. Univeristas Negeri Semarang

1. Pandangan Organisasi Mahasiswa Ekstra di UNNES Terhadap UKM PIB UNNES

Penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan dan pendapat Organisasi Mahasiswa Ekstra di Unnes yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, KAMMI, dan juga IMM terhadap pembentukan UKM PIB di UNNES mengingat menurut Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 yang menjadi dasar pembentukan UKM PIB dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa Organisasi Mahasiswa (UKM PIB) dalam kegiatan kemahasiswaan dapat melibatkan dan juga bekerja sama dengan Organisasi Kemahasiswaan Ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan kemahasiswaan dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 131

Menarik untuk mengetahui apakah dalam pembentukan UKM PIB ini kampus maupun pihak terkait telah mengajak Organisasi Mahasiswa Ekstra kampus untuk bergabung

.

¹³¹ Permenristekdikti No 55 Tahun 2018, Pasal 3 ayat 3.

maupun berpartisipasi dalam pembentukan UKM PIB ini, juga untuk mengetahui bagaimana pendapat Organisasi Ekstra Mahasiswa terkait dengan Efektivitas UKM PIB sejauh ini dalam memberikan penguatan Ideologi Pancasila kepada mahasiswa.

Baeti dari PMII Rayon Pancasila UNNES berpendapat bahwa dia tidak setuju dengan adanya UKM PIB karena hal itu membatasi gerakan gerakan dari eksternal menurutnya biarkan saja eksternal itu bergerak sendiri tanpa adanya UKM PIB, seperti keterangan berikut:

"Saya sebenernya kurang setuju dengan adanya ukmpib karena menurut saya itu hal yang membatasi gerakan gerakan kita dari eksternal, kalau menurut saya ya biarkan aja eksternal itu bergerak seperti biasanya tanpa adanya ukmpib" 132

Ketika ditanya soal apakah dalam pembentukan UKM
PIB ini sudah pernah disosialisasikan kepada Organisasi
Mahasiswa Ekstra dia menjawab:

"Belum ada itu sebenernya pas awal itu adanya Cuma seperti kegiatan kegiatan sosialisasi tentang ukmpib dan diskusi soal bagaimana ukmpib itu dan tapi yang hadir juga tidak seberapa, tidak lengkap gitu dan gaada follow upnya dari kegiatan tersebut" 133

¹³² Baeti, Wawancara oleh penulis, 4 maret 2020.

¹³³ Baeti, Wawancara oleh penulis , 4 maret 2020.

Dia mengatakan bahwa kegiatan UKM PIB tidak diketahui oleh mahasiswa banyak serta dia juga beranggapan bahwa Pancasila itu sudah kuat sehingga tidak perlu diperkuat lagi, seperti keterangan berikut:

"Kegiatan ukmpib juga tidak diketahui mahasiswa banyak dan pancasila itu sebenernya kan udah kuat kenapa mesti dikuatkan lagi kan katanya sakti "134

Muhammad Azka Fikri dari GMNI Komsat Unnes mengatakan bahwa UKM PIB di UNNES belum berkembang di kalangan mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa dimana organisasi ekstra/organisasi ideologi tidak diikutsertakan dalam kerja kerja organisasi. Seperti keterangan berikut:

"Ja<mark>di ukmpib di un</mark>nes i<mark>ni</mark> belum berkembang dikalangan mahasiswa/organisasi mahasiswa Organisasi ekstra/organisasi ideology tidak diikutsertakan dalam kerja kerja organisasi dan ukmpib dipolitisasi oleh jurusan PPKN yang melegitimasi bahwa anak-anak jurusan PPKN yang lebih tau tentang ideology negara"135

Ketika ditanya soal apakah dalam pembentukan UKM PIB ini sudah pernah disosialisasikan kepada Organisasi Mahasiswa Ekstra dia menjawab:

"Organisasi eksta hanya diikut sertakan saat pelantikan pengurus ukm tersebut"¹³⁶

¹³⁵Azka Fikri, Wawancara oleh penulis, 18 maret 2020.

¹³⁴ Baeti, Wawancara oleh penulis, 4 maret 2020.

¹³⁶ Azka Fikri, Wawancara oleh penulis, 18 maret 2020.

Dia juga mengatakan bahwa belum ada kerja organisasi untuk pembahasan bersama mahasiswa maupun organisasi mahasiswa soal bagaimana ideologi pancasila itu dijalankan, seperti keterangan berikut:

"Belum ada kerja organisasi untuk pembahasan bersama mahasiswa/organisasi mahasiswa soal bagaimana ideology pancasila itu dijalankan "137

Fiqi Indra Fahlupi dari HMI UNNES Raya mengatakan bahwa latar belakang berdirinya UKM PIB bisa dibilang aneh, karena struktur organisasinya dibentuk bukan dari elemen Organisasi Ekstra maupun Intra, tapi dibentuk oleh mahasiswa jurusan PPKN, seperti keterangan berikut:

"Latar belakang berdirinya ukmpib bisa dibilang aneg bin ajaib, Aneh karena struktur organisasinya dibentuk bukan dari elemen ormek dan ormin, tp dibentuk dan diisi oleh mahasiswa jurusan PPKN"138

Ketika ditanya soal apakah dalam pembentukan UKM PIB ini sudah pernah disosialisasikan kepada Organisasi Mahasiswa Ekstra dia menjawab:

"Selain itu memang tidak ada komunikasi sama sekali dgn ormek khususnya HMI untuk mendistribusikan kadernya di kepengurusan ukmpib" 139

¹³⁷ Azka Fikri, Wawancara oleh penulis, 18 maret 2020.

¹³⁸ Fiqi Indra Fahlupi, Wawancara oleh penulis, 13 maret 2020.

¹³⁹ Fiqi Indra Fahlupi, Wawancara oleh penulis, 13 maret 2020.

Dia juga mengatakan bahwa keaktifan UKM PIB semakin meredup karena menurutnya tidak ada kegiatan dan Cuma aktif beberapa bulan saja, seperti keterangan berikut:

"Keaktifan ukmpib juga semakin meredup bahkan sekarang saya lihat gaada Kegiatan Cuma aktif beberapa bulan aja dulu" 140

Ronal Sutrisno dari KAMMI Soshum UNNES mengatakan bahwa UKM PIB di UNNES hanya sekedar Formalitas saja karena secara substansial tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Menristek dimana anggota UKM PIB ini berasal dari organisasi kemahasiswaan intra kampus dan organisasi intra kampus serta melakukan pembinaan ideologi Pancasila dikampus tidak terealisasi, seperti keterangan berikut:

"Ukmpib di unnes itu kaya formalitas saja padahal secara substansial tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh menristek yaitu anggota ukmpib ini berasal dari organisasi kemahasiswaan intra kampus dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus mewadahi ormek dan melakukan pembinaan ideology pancasila dikampus dan itu tidak terealisasi, yang penting di unnes itu sudah ada ukmpib. Sekarang pun sudah tidak ada kabar lagi tentang ukmpib" 141

Ketika ditanya soal apakah dalam pembentukan UKM PIB ini sudah pernah disosialisasikan kepada Organisasi Mahasiswa Ekstra dia menjawab:

¹⁴⁰ Fiqi Indra Fahlupi, Wawancara oleh penulis, 13 maret 2020.

¹⁴¹Ronald Sutrisno, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020

"Iya sudah pernah disosialisasikan" ¹⁴²

Dia juga berpendapat bahwa UKM PIB masih kurang efektif, karena ada temannya yang sudah masuk ke dalam UKM PIB itu tetapi tidak ada kegiatan apa apa mengenai penguatan ideologi Pancasila, seperti keterangan berikut:

"Kurang efektif malah ada temen saya yang masuk ukmpib disitu tapi gaada kegiatan apa apa mengenai penguatan ideology hanya sebatas eo" 143

Abror dari IMM Komsat Hos Cokroaminoto UNNES mengatakan bahwa UKM PIB di UNNES tidak terlalu terasa peraturannya, menurutnya sedikit yang direalisasikan dari UKM PIB ini, seperti keterangan berikut:

"Terkait Ukmpib di unnes tidak terlalu terasa peraturannya, karena memang sedikit yang direalisasikan, pernah memang diangkat untuk diskusi public, yang membawa BEM univ untuk melihat dan membahas seperti apafungsi ukmpib jadi ga banyak yang direalisasikan. Disamping memang organisasi imm tidak dikendalikan oleh pihak birokrat kampus" 144

Ketika ditanya soal apakah dalam pembentukan UKM
PIB ini sudah pernah disosialisasikan kepada Organisasi
Mahasiswa Ekstra dia menjawab:

¹⁴² Ronald Sutrisno, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020

¹⁴³ Ronald Sutrisno, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020

¹⁴⁴ Abror, Wawancara oleh penulis, 6 april 2020.

"Tidak pernah, keaktifannya pun masih dipertanyakan, walaupun mau dibilang sebagai sosialisasi, tapi yang ada Cuma diskusi terkait ukmpib" 145

Dia juga mengatakan bahwa UKM PIB tidak efektif karena sebagai pengawas, dan juga dia berpandangan bahwa peraturan soal UKM PIB ini keluar setalah pembubaran organisai HTI dan menganggap anggota HTI masih ada tapi dalam wujud yang berbeda disitulah peraturan itu masuk, untuk mengendalikan organisasi diluar kampus, seperti keterangan berikut:

"Tidak Efektif karena itukan sebagai Pengawas, ya itu kan juga keluar pasca pembubaran organisasi HTI, jadi anggapan penyebaran anggota HTI masih ada tapi dalam wujud yang berbeda, nah disitulah peraturan itu masuk, untuk mengendalikan organisasi diluar kampus" 146

2. Tujuan dan Fungsi UKM PIB UNNES

Penting untuk mengetahui apa tujuan dan fungsi dari UKM PIB untuk mengetahui apakah yang sudah dilakukan UKM PIB ini sudah sesuai dengan tujuan serta fungsi dia dibentuk.

UKM PIB UNNES bertujuuan untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter dan memahami, menhayati, dan mengamalkan konsesus dasar bebangsa dan bernegara

_

¹⁴⁵ Abror, Wawancara oleh penulis, 6 april 2020.

¹⁴⁶ Abror, Wawancara oleh penulis, 6 april 2020.

(Pancasila. UUD NRI, NKR, Bhineka Tunggal Ika). Menjadikan konsesnsus berbangsa dan bernegara sebagai dasar dan rujukan setiap kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Membentuk mahasiswa yang paham dan dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan konservasi dalam memajukan Universitas Negeri Semarang. Menjalin kerjasama antar unit kegiatan mahasiswa untuk UNNES selalu jaya. 147

Fungsi UKM PIB UNNES adalah:

- Sebagai tempat peningkatan IMTAQ mahasiswa UNNES terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Sebagai tempat pembinaan karakter Pancasila Mahasiswa UNNES.
- 3. Sebagai tempat pengembangan bakat, minat, dan potensi diri mahasiswa UNNES.
- 4. Sebagai tempat pengkajian historis, konseptualis, dan aktualisasi Pancasila. 148

3. Efektivitas Pembentukan UKM PIB UNNES

Ketika ditanya perihal apakah dalam pembentukan UKM PIB ini sudah disosialisasikan kepada Organisasi Mahasiswa Ekstra, Pak Noorochmat sebagai Pembina UKM PIB UNNES mengatakan bahwa UNNES lewat beberapa ahli hukum dan pengamat kemahasiswaan sudah menganalisis soal

¹⁴⁷ Anggaran Dasar UKM PIB Unnes Bab III Pasal 7.

¹⁴⁸ Anggaran Dasar UKM PIB Unnes Bab III Pasal 10.

Peraturan Permenristekdikti No 55 tahun 2018 tersebut apakah semuanya relevan dengan kehidupan kampus, dalam artian Unnes tidak hanya menerima Peraturan Permenristekdikti itu secara utuh tetapi juga telah melakukan kajian dengan memberikan langkah-langkah yang bijaksana agar peraturan tersebut tidak bertabrakan dengan peraturan yang lainnya, seperti keterangan berikut:

"Anda sudah membayangkan kalau kampus kemudian dimasuki dengan organisasi ekstra sesuai dengan aturan aturan perguruan tinggi, karena sebelum itu diputuskan kami ada bebera<mark>pa ahli hukum peng</mark>amat kemahasiswaan itu sudah menganali<mark>sis</mark> peraturan peraturan itu apakah semuanya relevan d<mark>engan kehidu</mark>pan <mark>ka</mark>mpus nah pertanyaan saya apakah <mark>anda mene</mark>ri<mark>ma PP i</mark>tu secara utuh atau anda memberikan langkah langkah bijaksana karena ada hal lain yang bisa bertabrakan, sudah melakukan kajian belum? ditempat kami itu ada beberapa ahli kebijakan publik bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah harus disikapi secara bijak dipertimbangkan dengan peraturan peraturan yang lain maka di unnes mengambil langkah langkah yang berbeda mungkin ya dengan tempat lain, karena kami tau hukum kami dari kemahasiswaan kami punya hak dan kewajiban nah itu itu pertimbangannya",149

Lebih lanjut pak Noorochmat menjelaskan bahwa adalah Hak warga negara atau hak mahasiswa disebuah kampus untuk mendeklarasikan unitnya, mereka yang mempunyai

.

¹⁴⁹ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

kepedulian terhadap pancasila pasti sudah tahu dan tidak perlu diberi tahu karena yang namanya deklarasi itu tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada semuanya, karena UKM PIB terbuka dengan syarat memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai pancasila sehingga pada waktu itu yang mendeklarasikan murni mahasiswa UNNES dalam hal ini berasal dari berasal dari epistem community PKn yang didalamnya ada mahasiswa PPKn dan Ilmu Politik yang diwakili oleh Hima. Untuk Organisasi Mahasiswa Ekstra dari luar itu tidak ada tanggung jawab karena organisai dari lar itu dibawah pembinaan yang lain dan nanti di khawatirkan salah asuh. Seperti keterangan berikut:

"Mengenai apakah itu sudah disosialisasikan atau tidak adalah hak warga negara untuk mendeklarasikan atau hak hak mahasiswa disatu kampus untuk mendeklarasikan unitnya itu, mereka mereka yang mempunyai kepedulian terhadap pancasila pasti sudah tau gak perlu diberitahu karena yang namanya deklarasi itu tidak kewajiban memberitahukan kepada semuanya seperti proklamasi indonesia apa ya mbahmu diberitahu oleh soekarno proklamasi kemerdekaan indonesia lho kan gitu kan gak tho, itu harusnya mereka yang memang ingin terlibat secara individu kepada ukmpib, ukmpib terbuka syaratnya memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai pancasila itu yang membedakan kajian kami mungkin dengan kampus kampus yang lain oleh karena tempat kami ada ahli hukumnya ahli tata negaranya ada pakar pakar kehamasiswaan, ada

pertimbangan pertimbangan tentang situasi pendididkan ya dan itu semua sehingga keputusan waktu itu yang kemudia saya ambil yang mendeklarasikan murni mahasiswa unnes dalam hal ini berasal dari epistem community pkn didalamnya ada mahasiswa ppkn dan ilmu politik itu itu yang diwakili oleh hima ya untuk ormek dari luar tidak ada tanggung jawab karena organisasi dari luar itu dibawah pembinaan yang lain nanti salah asuh karena begitu ada ada anggotanya bukan dari unnes, unnes diminta untuk mengasuh soal kebijakan itu "150"

Dia juga menambahkan bahwa dalam Statuta Universitas, Universitas tidak mungkin akan membina Organisasi Ekstra Kampus, karena menurutnya Organisasi Ekstra Kampus sudah ada lembaga lain yang membina. Seperti keterangan berikut:

"Ini contohnya undang-undang yang menurut kami itu controversial kami kaji, kami lingkari, kami diskusikan ya jadi tidak begitu saja menerima tetapi ada iktikad baik untuk mensosialisasikan pancasila dan memberikan kemerdekaan berserikat berkumpul bagi mahasiswa terkait dengan bidang ideology itu yang kami tanggapi dengan baik yang lain lainnya kami kritik berdasarkan pertimbangan akademik, filsafat, hukum, kebijakan public, dan bidang kemahasiswaan serta statuta universitas karena dalam statuta universitas itu, universitas tidak mungkin akan membina organisasi ekstra kampus, karena organisasi ekstra kampus sudah ada lembaga lain yang membina itu" 151

¹⁵⁰ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020. ¹⁵¹ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

138

Ketika ditanya mengenai apakah dalam penerapan UKM PIB di UNNES sudah mempunyai dampak yang signifikan dalam memberikan penguatan Ideologi Pancasila kepada mahasiswa pak Noorochmat mengatakan bahwa diantara sudah dampak dilakukan adalah yang memperkenalkan olahraga yang terkait yang terkait dengan karakter-karakter Pancasila diantaranya olahraga lempar pisau kapak tanpa karakter Pancasila bisa disalahgunakan, lalu peringatan hari besar hari kabangkitan nasional mendukung dalam bulan Pancasila, peringatan sumpah pemuda, kemudian dibidang pengabdian masyarakat sudah turun langsung ke masyarakat memberikan pembelajaran tentang karakter karakter wayang kemudian juga mengikuti peduli bencana nah itu merupakan dampak dari kegiatan kegiatan yang sduah dilakukan UKM PIB, seperti keterangan berikut:

"Pertama anda harus tau tujuan organisasi organisasi itu ada tujuan ke dalam, sedangkan yang keluar itu program kerja terkait dengan bidang pengabdian, beberapa dampaknya ya ini sudah tercatat juga ya ada catatannya, bidang kajian pancasila, kutipan buku, kepustakaan, olahraga, olahraga ini juga memperkanalkan olahraga yang terkait dengan karakter karakter pancasila diantaranya olahraga lempar pisau kapak tanpa karakter pancasila bisa disalahgunakan, peringatan hari besar ya kemudian hari kebangkitan nasional mendukung dalam bulan pancasila, sumpah pemuda dan lain sebagainya nah jadi dampaknya itu bisa dilihat dari kegiatan kegiatan

yang sudah dilakukan ukmpib, dan pada tahun itu juga ada 2019 maksudnya disetujui oleh rektorya sekali lagi ada sk setelah dideklarasikan pasti ada rektornya. tata keorganisasian, ini surat dari rektor yang menyatakan bahwa ukmpib itu ukm yang legal di unnes, kemudian dibidang pengabdian masyarakat sudah turun langsung ke masyarakat memberikan pembelajaran tentang karakter wayang ya itu tercantum didalam, kemudian ikut ukm fair ada ikut dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas ditempat kami itu ada pameran seluruh ukm kita juga mengikuti itu kemudian peduli bencana, pengabdian masyarakat ya dan lain sebagainya jd dalam waktu satu tahun kepengurusan yang lalu kegiatannya sudah cukup banyak begitu"¹⁵²

Ilham Basuki Pantja sebagai Ketua UKM PIB UNNES 2019-2020 mengatakan bahwa UKM PIB UNNES mungkin sejauh ini belum efektiv karena anggotanya masih sedikit dan mayoritas 80% anggotanya berasal dari jurusan PKn, belum menjagkau fakultas lainnya karena ini adalah UKM jadi inginnya menjangkau tingkat universitas, dan kalau kegiatan yang sudah dilakukan sejauh ini manfaatnya Positif. Seperti keterangan berikut:

"Klo efektiv mungkin belum efektiv ya soalnya juga anggotanya masih sedikit juga kebanyakan mayoritas hampir 80 persen juga masih dari jurusan PKn kemudian ya belum terlalu menjangkau ke fakultas fakultas lain lah kan pengennya ini menjadi apa ukm yang tingkatnya univ tapi belum tapi

.

¹⁵² Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

kalau kegiatan kegiatan sih sejauh ini ya manfaat manfaat positif gitu sih mas''¹⁵³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muchamad Aulia Arifin sebagai Ketua UKM PIB UNNES 2018-2019, dimana dia mengatakan bahwa belum bisa dilihat apakah UKM PIB ini sudah efektiv atau belum, karena UKM PB ini statusnya masih baru, seperti keterangan berikut:

"Pastinya ada dampak terhadap penguatan ideology pancasila karena dengan adanya ukmpib unnes tentunya menambah wadah bagi mahasiswa untuk berkegiatan dalam mengkaji historitas, konseptualitas, dan aktualisasi nilai nilai pancasila. Namun belum bisa dilihat sudah efektiv atau belum dikarenakan ukm pib ini masih baru"¹⁵⁴

b. Universitas Semarang

1. Pandangan Organisasi Mahasiswa Ekstra di USM Terhadap UKM PIB USM

Penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan dan pendapat Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di USM seperti PMII dan HMI terhadap pembentukan UKM PIB di USM mengingat menurut Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 yang menjadi dasar pembentukan UKM PIB dalam Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa Organisasi Mahasiswa (UKM PIB) dalam kegiatan kemahasiswaan dapat melibatkan

¹⁵³ Ilham Basuki Pantja, Wawancara oleh penulis, 28 juni 2020.

¹⁵⁴ Muchamad Aulia Arifin, Wawancara oleh penulis , 24 februari 2020.

dan juga bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Di USM sendiri ada SK Rektor tentang pelarangan Organisasi Mahasiswa Ekstra dimana tidak diperkenankan menggunakan nama Universitas dan membawa atribut ke dalam kampus. Sehingga kemudian temen-temen Mahasiswa USM yang bergabung dengan Organisasi Mahasiswa Ekstra memakai nama lain, seperti PMII yang memakai nama Komsat Sholeh Darat, GMNI memakai nama Komsat Soetta (karena berada di jalan soekarno-hatta) dan HMI dengan nama Komsat Usm Jaya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan mbak Choerunnisak sebagai ketua UKM PIB USM dimana dia mengatakan bahwa Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di Usm tidak boleh memakai kata Usm maupun menggunakan logo Usm, seperti keterangan berikut:

"Nggak boleh komisariat tapi mereka kan ada subnya, Cuma memang tidak boleh ada kata-kata usm mungkin dia pake nama yang lain, kaya di unissula kan pake nama yang lain, ya nggak komisariat unissula enggak tapi ada namanya sendiri, nah disini kita juga nggak boleh pake embel embel usm logo dan lain sebagainya tidak diperbolehkan apalagi kemaren kan juga ada kontroversi mengenai pemilu di indonesia pemilihan presiden kemaren, nah disitu kan juga gencar

_

¹⁵⁵ Aldi, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020.

¹⁵⁶ Sahal, Wawancara oleh penulis, 24 maret 2020.

gencarnya eksternal juga masuk nah tetep kita pertegas klo eksternal gaboleh berdiri disini "157"

Sahal dari PMII komsat Sholeh Darat mengatakan bahwa dia cukup mengapresiasi respon rektorat untuk segera membentuk UKM PIB, namun hal itu juga diikuti beberapa kekecewaan, seperti keterangan berikut:

"Soal ukmpib di usm tentu kami cukup mengapresiasi dengan respon rektorat untuk segera membentuk ukmpib setelah adanya permen keluar. Namun juga diikuti beberapa kekecewaan" 158

Ketika ditanya soal apakah dalam pembentukan UKM
PIB ini sudah pernah disosialisasikan kepada Organisasi
Mahasiswa Ekstra dia menjawab bahwa dalam pembentukan
UKM PIB sama sekali tidak melibatkan Organisasi Mahasiswa
Ekstra, seperti keterangan berikut:

"Kedua, nah di point ini yang memang membuat kami (PMII, HMI, GMNI) kecewa. Karena waktu itu awal pembentukan sama sekali tidak ada keterbukaan dari petinggi univ ataupun teman2 yang dilibatkan (resimen mahasiswa). Hanya tiba-tiba saja sudah ada kabar tentang ukmpib didirikan, dan sama sekali tidak melibatkan organ ekstra. Ditambah kabar tersebut dibarengi dengan arogansi petinggi univ yang mengeluarkan SK tentang pelarangan organ ekstra di usm, yang akhirnya (PMII, HMI, GMNI) ada gesekan dengan BEM dan DPM univ "159"

.

¹⁵⁷ Sahal, Wawancara oleh penulis, 24 maret 2020.

¹⁵⁸ Sahal, Wawancara oleh penulis, 24 maret 2020.

¹⁵⁹ Sahal, Wawancara oleh penulis, 24 maret 2020.

Dia juga mengatakan bahwa belum ada peran yang cukup signifikan dari temen-temen PIB, dia merasa bahwa yang menjadi pengurus tidak memahami betul amanah Permenristekdikti No 55 Tahun 2018, apalagi mereka semua berasal dari orgaisasi intra, tidak bisa berbicara soal Ideologi, seperti keterangan berikut:

"Sampai hari ini belum ada peran yang cukup signifikan dari temen-temen PIB. Kami merasa mereka yang menjadi pengurus tidak memahami betul amanah Permenristekdikti 55 2018. Apalagi mereka semua dari organisasi intra semua, tidak biasa ngomong soal ideology. ya pada akhirnya aktivitas mereka jatuh pada hal2 formalitas (mengadakan seminar2an)"

Aldi dari GMNI komsat Soetta mengataan bahwa UKM PIB belum mendapatkan tempat di hati kawan-kawan baik yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa Intra maupun Ekstra, banyak hal yang harus dibenahi dan dibicarakan ulang di UKM PIB, seperti keterangan berikut:

"Ukmpib yang ada di USM belum mendapatkan tempat dihati kawan –kawan mahasiswa baik yang bergabung dalam orma intra maupun ekstra. Banyak hal yang harus dibenahi dan dibicarakan ulang di pib harusnya tidak ada ketua harusnya hanya berbentuk koordinasi, di usm salah kaprah pib itu sediri diinisiasi sama cipayung plus tapi di usm jarang yang ikut organisasi ekstra" 160

¹⁶⁰ Aldi, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020.

Ketika ditanya soal apakah dalam pembentukan UKM PIB ini sudah pernah disosialisasikan kepada Organisasi Mahasiswa Ekstra dia menjawab bahwa belum pernah di sosialisasikan karena di USM Organisasi Ekstra mahasiswa dilarang oleh Rektor, dan seharusnya menurut dia UKM PIB memang diisi oleh kawan-kawan Ekstra, seperti keterangan berikut:

"Karena menurut saya ukm pin harus melibatkan anak ekstra bung seperti GMNI,HMI,PMII dll. Belum, soalnya kalo di USM ekstra di larang sama rektor dan harusnya memang di isi oleh kawan-kawan ekstra. kalo sependek pengetahuan saya baru kawan saya anak gmni bung, baru satu orang Soalnya ukm PIB setahu saya juga baru merintis baru menyelesaikan proker yang kemarin Kunjungan kunjungan ke lembaga lembaga sama membuat seminar bung dan belum berjalan massif ya karena itu tadi menurut saya alangkah baiknya di isi kawan kawan ekstra,akan tetapi ada SK dari rektor bahwasanya tidak di perkenankan anak anak ekstra menggunakan nama univ & membawa atribut ke dalam kampus Sehingga ukm pib belum mendapat hati daripada kawan2 ekstra sendiri" 161

Dia juga mengatakan bahwa UKM PIB ini bisa efektiv karena nantinya kawan-kawan mahasiswa bisa belajar berdiskusi mengikuti seminar-seminar tentang pancasila, dan dengan berjalannya waktu akan memperkuat ideologi Pancasila kepada mahasiswa, seperti keterangan berikut:

¹⁶¹ Aldi, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020.

"Menurutku bisa efektiv dilingkungan usm karena nantinya kawan-kawan bisa belajar berdiskusi mengikuti seminar seminar tentang pancasila dan mulai dari hal-hal kecil itulah nantinya akan mengetahui nilai-nilai luhur pancasila. Apabila telah berjalannya waktu tentu akan memperkuat ideology pancasila kepada mahasiswa" 162

2. Efektivitas Pembentukan UKM PIB USM

Ketika ditanya perihal apakah dalam pembentukan UKM PIB ini sudah disosialisasikan kepada Organisasi Mahasiswa Ekstra Bu Tri Mulyani sebagai Pembina UKM PIB USM mengatakan bahwa saat UKM ini akan dibentuk sudah melibatkan organisasi-organisasi yang ada di USM seperti Badan Legislasi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Aliansi Organisasi Ekstra yang direalisasikan dalam bentuk rapat terbatas, yang menghasilkan kesepakatan bersedia bergabung dalam kegiatan UKM PIB. Seperti keterangan berikut

"Walau tidak secara langsung namun saat ukm ini akan dibentuk kami melibatkan organisasi—organisasi yang ada di usm seperti badan legislasi mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan aliansi organisasi ekstra/ormek yang direalisasikan dalam bentuk rapat terbatas yang dihadiri perwakilan dari masing-masing organisasi untuk menyelaraskan pendapat dan tujuannya dan menghasilkan satu surat pernyataan sikap dari organisasi ektra/ormek yang

¹⁶² Aldi, Wawancara oleh penulis, 21 maret 2020.

menyatakan sepakat dan mau bergabung dalam kegiatan ukmpib, dan kami juga melakukan sosialisasi ke beberapa fakultas yang ada di usm¹⁶³

Lalu ketika ditanya mengenai apakah dalam penerapan UKM PIB di USM sudah mempunyai dampak yang signifikan dalam memberikan penguatan Ideologi Pancasila kepada mahasisiswa, Bu Tri Mulyani mengatakan bahwa hal itu Belum, karena untuk dapat mempengaruhi seseorang atau organisasi, dari UKM PIB sendiri masih mencoba dan menggali kekuatan untuk menunjukan identitas dari UKM terlebih dahulu. Dengan cara pendekatan melalui kegiatan-kegiatan diskusi dan program kerja untuk sedikit demi sedikit membangunh perspektif dan paradigm yang baik dimata mahasiswa maupun organisasi yang sesuai dengan tujuan UKM itu sendiri, Seperti keterangan berikut:

"Belum karena untuk dapat mempengaruhi seseorang atau organisasi kami dari ukmpib sendiri masih mencoba mencari dan menggali power untuk menunjukan identitas dari ukm kami terlebih dahulu. Agar orang-orang yang lain mampu menilai dan memahami kita bukan sebagai organisasi garis keras dengan keistimewaan yang kami miliki. Kami memiliki tujuan yang baik sesuai amanah pemenristekdikti untuk membantu membangun rasa ideology disetiap mahasiswa jaman sekarang, oleh karena itu kami menyikapi itu dengan mendekati melalui kegiatan-kegiatan diskusi dan program kerja kami untuk sedikit demi sedikit membangun perspektif

¹⁶³ Tri mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

dan paradigma yang baik baik di mata mahasiswa/organisasi yang sesuai dengan tujuan dari UKM ini sendiri"¹⁶⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh mbak Choerunnisak sebagai Ketua UKM PIB USM, seperti keterangan berikut:

"Klo efektiv banget sih belom Cuma klo untuk menambahkan dalam artian dari yang sebelum sebelumnya lebih ada kemajuan soalnya kan kita sekarang ada kewajiban tiap ada kegiatan harus disisipkan, nah maka dari itu kita memasukkan" 165

Analisis

Dalam mengukur Efektivitas pembentukan UKM PIB baik di UNNES maupun USM, penulis menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Siagian. Siagian seperti yang dikutip Dhimas Cahyo Pratama menjelaskan Kriteria atau Ukuran mengenai pencapaian tujuan secara Efektif atau tidak adalah:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan UKM PIB ini adalah untuk melakukan pembinaan dan juga memberikan pengutan Ideologi Pancasila ataupun mensosialisasikan Pancasila kepada seluruh mahasiswa. Yang sudah dilakukan oleh UKM PIB baik di UNNES

¹⁶⁴ Tri mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

¹⁶⁵ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

maupun di USM dalam rangka memberikan pembinaan, penguatan ataupun mensosialisasikan Ideologi Pancasila kepada mahasiswa adalah melakukan Kajian, diskusi, maupun Seminar tentang Pancasila kepada mahasiswa seperti keterangan Pak Noorochmat sebagai Pembina UKMPIB UNNES berikut:

"Jadi sebelumnya sudah ada bibitnya yang bernama kelompok studi pancasila tetapi hanya terbatas di jurusan untuk lebih efektif dan efisien dalam tujuan mensosialisasikan pancasila kepada seluruh mahasiswa akan lebih baik kalau tingkatnya tingkat universitas" 166

Dan juga keterangan Ilham Basuki Pantja sebagai ketua UKM PIB UNNES sebagai berikut:

"...sebenernya kita itu Cuma istilahnya kaya mengkaji tentang pancasila kaya pembinaan, kaya historisnya kaya konsepnya apanya tentang pancasila dan kita gabakal gabakal dipikiran mereka mau masuk kayak apa gabakal dan kita sebenernya malah pengennya itu kaya mahasiswa mahasiswa itu ya gabung ke kita itu supaya tambah dalam tambah tau tentang pancasila gitu"

"...tapi kalo sementara sekarang klo yg pib yang di unnes ini ya Cuma sebatas gitu aja mengkaji kaji tentang pancasila, diskusi, turun ke masyarakat buat itu kayak ke desa kaya buat acara sama anak-anak kecil gitu tentang mengajar pancasila gitu"¹⁶⁷

Begitupun dengan keterangan Bu Tri Mulyani sebagai Pembina UKM PIB USM sebagai berikut:

¹⁶⁶ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

¹⁶⁷ Ilham basuki pantja, Wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

"Kami memiliki tujuan yang baik sesuai amanah pemenristekdikti untuk membantu membangun rasa ideology disetiap mahasiswa jaman sekarang oleh karena itu kami menyikapi itu dengan mendekati melalui kegiatan-kegiatan diskusi dan program kerja..." 168

Dan juga keterangan Choerunnisak sebagai Ketua UKM PIB USM sebagai berikut:

"Ya kegiatan kaya seminar gitu cuma ini kita mau ada tambahan kita gabungan sama lemhanas sama bagian komnas ham juga sama rumah pancasila disini..." 169

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasraansasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Para Implementer disini adalah UKM PIB secara organisasi dan secara khusus adalah anggota UKM PIB baik itu di UNNES maupun USM. Para anggota UKM PIB ini tentu sudah mengerti bahwa tujuan dari UKM ini adalah untuk memberikan penguatan Ideologi Pancasila dengan sasarannya adalah para mahasiswa yang ada dikampus tersebut. Hal ini dapat diketahui baik ketika UKM PIB ini melakukan *Open Recruitment* anggota, ketika sesi wawancara maupun ketika UKM PIB ini sedang

¹⁶⁸ Tri Mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

¹⁶⁹ Choerunnisak, Wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

melakukan sosialisasi di dalam kampus maupun ke Fakultas-fakultas yang ada dikampus mereka.

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pembentukan UKM PIB setiap kampus tentu sudah melakukan kajian dan analisis yang matang terhadap Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 agar mempunyai dasar yang kuat tentang mengapa UKM PIB dibentuk di kampus mereka. Dan juga agar Permenristekdikti tersebut tidak bertentangan maupun bertabrakan dengan peraturan lainnya di kampus. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Noorochmat sebagai berikut:

"...karena sebelum itu diputuskan kami ada beberapa ahli hukum pengamat kemahasiswaan itu sudah menganalisis peraturan peraturan itu apakah semuanya relevan dengan kehidupan kampus..."¹⁷⁰

"ditempat kami itu ada beberapa ahli kebijakan publik bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah harus disikapi secara bijak dipertimbangkan dengan peraturan peraturan yang lain..."

Begitu juga di USM dimana menurut keterangan bu Tri Mulyani pendirian UKM PIB ini berbeda dengan UKM pada umumnya (yang memakai aturan universitas), karena

¹⁷⁰ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

¹⁷¹ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

dasar pembentukan UKM PIB ini adalah peraturan Menteri dan juga didukung dengan asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan akan berlaku langsung sejak dikeluarkan, seperti keterangan berikut:

"Oleh karena itu, UKM PIB dalam pendirian berbeda dengan UKM pada umumnya mengingat adanya asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan akan berlaku langsung sejak dikeluarkan. Walaupun Universitas Semarang memiliki aturan tersendiri dalam pembentukan UKM baru, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri yang merupakan aturan lebih tinggi mengingat asas lex superiori de rogat legin feriori" 172

"Secara historis, UKM PIB merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Radikalisme dan Terorisme Universitas Semarang berdasarkan instruksi langsung oleh Prof. Dr. H. Muladi, S.H. selaku Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro..."

d. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Dalam UKM PIB baik di UNNES maupun USM penyusunan program-program (karena sudah berbentuk UKM) dibentuk lewat Musyawarah Kerja maupun

¹⁷² Tri mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

¹⁷³ Tri mulyani, Wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

Musyawarah Besar dengan nama Program Kerja yang berlaku selama satu tahun kepengurusan dan disusun di awal kepengurusan setelah terpilihnya ketua dan juga struktur kepengurusan, agar para Impelementer maupun pelaksana memiliki pedoman dalam bertindak maupun bekerja. Lewat data-data yang sudah dipaparkan diatas diketahui bahwa UKM PIB baik di UNNES dan juga USM sudah mempunyai Program Kerja masing-masing dalam jangka waktu satu tahun kepengurusan, dan juga melakukan laporan pertanggung jawaban terhadap program kerja yang sudah dilakukan.

e. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang disediakan organisasi.

Pihak Kampus baik UNNES maupun USM telah menyediakan Sarana dan juga Prasarana untuk mendukung produktifitas UKM PIB. Sarana yang sudah disediakan oleh UNNES maupun USM adalah diberikannya kewenangan untuk melakukan sosialisasi UKM PIB kepada mahasiswa dan juga UKM PIB yang sifatnya terbuka kepada siapapun mahasiswa yang ingin bergabung.

Seperti keterangan dari Pak Noorochmat sebagai Pembina
UKM PIB UNNES berikut:

"...ukmpib terbuka syaratnya memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai pancasila..."¹⁷⁴

Juga menurut keterangan dari Ilham Pantja sebagai ketua UKM PIB UNNES berikut:

"klo disini sistemnya siapa aja boleh ikut gitu kaya ukm ukm biasa asal kamu mahasiswa unnes kamu daftar ikut" ¹⁷⁵

Seperti keterangan Bu Tri mulyani sebagai Pembina
UKM PIB sebagai berikut:

"...dan ka<mark>mi</mark> ju<mark>ga</mark> melakukan sosialisasi ke beberapa fakultas yang ada di usm"¹⁷⁶

Juga keterangan Choerunnisak sebagai Ketua UKM PIB USM sebagai berikut:

"kita sosialisasi ke tiap fakultas trus kita minta untuk ada delegasi kemudian yang dari eksternal karena kita kan juga mencakupnya sama yang organisasi diluar kampus nah itu kita koordinasi sama ketua, kaya hmi, pmii"¹⁷⁷

Sarana lainnya yang diberikan oleh kampus yaitu berupa Anggaran yang diberikan setiap tahun agar mendukung berbagai Program Kerja yang sudah ditentukan

¹⁷⁴ Noorochmat, Wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

¹⁷⁵ Ilham Basuki Pantja, wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹⁷⁶ Tri Mulyani, wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

¹⁷⁷ Choerunnisak, wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

supaya berjalan dengan maksimal. Seperti keterangan Pak Noorchmat berikut:

"anggaran pertama kemahasiswaan di unnes untuk anggran sudah ditetapkan oleh universitas ya dan rata rata tiap ukm itu akan diberikan yang sama kecuali besar kecilnya ukm dan jenis..."¹⁷⁸

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ilham Pantja sebagai berikut:

"tapi ada anggaran per ukm gitu tapi kita kalau mau nambah gitu kaya ada dana minimal ada dana maksimal, kalau kita ini nih propsalnya kalau proposalnya apa ketrima atau acc bisa ditambahin ada dana yg tetap ada dana tambahan kmarin baru nyinggung nyinggung lah pak nor katanya sih sekitar 4 jutaan bisa nambah maksimalnya 8 lah" 179

Seperti Keterangan Bu Tri Mulyani sebagai berikut:

"untuk anggaran ukmpib mendapatkan lima ratus ribu rupiah dan itu dipergunakan untuk program kerja ukm dan anggaran tersebut didapatkan dari universitas..."¹⁸⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Choerunnisak sebagai berikut:

"anggaran kita ada anggaran dari kampus jadi kita karena udah ukm kita ada anggaran sendiri dari kampus tapi memang tidak sebanyak ukm yang lain tapi sudah ada anggaran, jadi harus kita pengajuan dulu walaupun kita

¹⁷⁸ Noorochmat, wawancara oleh penulis, 3 juni 2020.

¹⁷⁹ Ilham Basuki Pantja, wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹⁸⁰ Tri Mulyani, wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

udah tau dapet berapa tapi kita harus pengajuan dulu diberikan, bagian keuangan "181"

Pra Sarana yang sudah disediakan oleh UNNES maupun USM adalah berkaitan dengan Tempat. Karena sudah berbentuk sebagai UKM maka UKM PIB di UNNES dan USM sudah mempunyai tempat sendiri seperti UKM pada umumnya yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul, berdiskusi, rapat dan juga menyimpan barangbarang terkait dengan UKM PIB.

f. Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuan.

Hal yang belum tercapai dalam UKM PIB baik di UNNES maupun USM adalah soal Efektif dan efisien, terutama soal Keefektifan dari UKM PIB ini. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah karena UKM PIB ini masih baru sehingga diperlukan waktu untuk membuat UKM PIB menunjukkan eksistensi serta identitasnya kepada mahasiswa agar para mahasiswa ini kemudian bisa menilai dan memahami tujuan dari UKM PIB ini sehingga nanti mereka akan memutuskan untuk bergabung.

¹⁸¹ Choerunnisak, wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

Selain itu karena UKM ini masih baru sehingga banyak mahasiswa yang belum mengenal UKM ini yang mengakibatkan untuk sementara ini anggotanya masih belum terlalu banyak, juga kegiatan yang sudah dilakukan masih sedikit dan belum terlalu terlihat di kalangan mahasiswa, seperti keterangan berturut-turut dari Aulia Arifin sebagai ketua UKM PIB UNNES 2018-2019, Ilham Basuki Pantja sebagai Ketua UKM PIB UNNES 2019-2020, Bu Tri Mulyani sebagai Pembina UKM PIB USM, dan juga Choerunnisak sebagai Ketua UKM PIB USM, sebagai berikut:

"Pastinya ada dampak terhadap penguatan ideology pancasila karena dengan adanya ukmpib unnes tentunya menambah wadah bagi mahasiswa untuk berkegiatan dalam mengkaji historitas, konseptualitas, dan aktualisasi nilai nilai pancasila. Namun belum bisa dilihat sudah efektiv atau belum dikarenakan ukm pib ini masih baru",182

"Klo efektiv mungkin belum efektiv ya soalnya juga anggotanya masih sedikit juga kebanyakan mayoritas hampir 80 persen juga masih dari jurusan pkn kemudian ya belum terlalu menjangkau ke fakultas fakultas lain lah kan pengennya ini menjadi apa ukm yang tingkatnya univ tapi belum tapi kalau kegiatan kegiatan sih sejauh ini ya manfaat manfaat positif gitu sih mas''183

¹⁸² Aulia Arifin, Wawancara oleh penulis, 24 februari 2020.

¹⁸³ Ilham Basuki Pantja, wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

"...mungkin juga kegiatan setaun kemaren juga masih belum kelihatan masih ya dikitlah" ¹⁸⁴

"Belum karena untuk dapat mempengaruhi seseorang atau organisasi kami dari ukmpib sendiri masih mencoba mencari dan menggali power untuk menunjukan identitas dari ukm kami terlebih dahulu agar orang-orang yang lain mampu menilai dan memahami kita bukan sebagai organisasi garis keras dengan keistimewaan yang kami miliki..."

"Klo efektiv banget sih belom Cuma klo untuk menambahkan dalam artian dari yang sebelum sebelumnya lebih ada kemajuan soalnya kan kita sekarang ada kewajiban tiap ada kegiatan harus disisipkan, nah maka dari itu kita memasukkan "186"

Hal serupa juga diungkapkan oleh perwakilan masing-masing Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di UNNES dan USM, dimana 5 Organisasi Mahasiswa Ekstra di UNNES yang terdiri dari PMII, GMNI, HMI, KAMMI, dan IMM mengatakan bahwa UKM PIB di UNNES ini masih belum Efektif, sementara itu di Usm 1 Organisasi Mahasiswa Ekstra yaitu PMII mengatakan belum efektif dan 1 Organisasi Mahasiswa Ekstra yaitu GMNI mengatakan bisa Efektif.

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna

¹⁸⁶ Choerunnisak, wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

158

¹⁸⁴ Ilham Basuki Pantja, wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹⁸⁵ Tri Mulyani, wawancara oleh penulis, 28 april 2020.

maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sebagai sebuah UKM baik di UNNES maupun USM, UKM PIB tentu mendapatkan pengawasan, pengendalian dan bimbingan dari kampus melalui Dosen yang ditunjuk sebagai Pembina pada UKM PIB tersebut. Sebagai contoh di UKM PIB UNNES dalam membuat program kerja melakukan konsultasi kepada Pembina terlebih dahulu, seperti keterangan Ilham Basuki Pantja berikut:

<mark>"</mark>…iya <mark>ke</mark> pe<mark>mb</mark>ina <mark>du</mark>lu baru ke pusat"¹⁸⁷

Hal serupa juga terjadi di Usm dimana Pembina UKM PIB USM yaitu Bu Tri Mulyani sering member evaluasi, ikut dalam rapat, dan juga member saran dalam berbagai kegiatan UKM PIB USM, seperti keterangan Choerunnisak sebagai berikut:

"Sering ngasih evaluasi, sering rapat juga, jadi kita lebih interaktif sama Pembina karena dia ikut rapat juga jadi kalau kita ada kumpul apa bu Tri selalu ikut selalu mendampingi Cuma memang nanti keputusan kan bulatnya di temen temen semua, bu tri hanya memberi saran" 188

_

¹⁸⁷ Ilham Basuki Pantja, wawancara oleh penulis, 20 februari 2020.

¹⁸⁸ Choerunnisak, wawancara oleh penulis, 20 maret 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh hasil penelitian tentang Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pembentukan UKM PIB baik di UNNES maupun di USM sebagai bentuk Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 sudah berjalan dengan cukup baik. Dimulai dengan mendeklarasikan UKM PIB, Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, Membentuk struktur kepengurusan, Membentuk program kerja, Mendapatkan anggaran dari kampus, Melaksanakan program kerja, dan juga melaporkan laporan pertanggungjawaban di akhir kepengurusan. Selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan oleh George Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan juga Struktur Birokrasi juga sudah dilaksanakan dengan baik.
- 2. Penerapan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 di UNNES dan juga USM sudah berjalan Efektif dengan menggunakan pendekatan dari Siagian. Siagian menjelaskan bahwa ada tujuh kriteria untuk mengukur pencapaian tujuan secara efektif ataupun tidak. Dari ke tujuh kriteria itu enam kriteria diantaranya telah terpenuhi dengan baik. Sementara 1 kriteria yang belum terpenuhi yaitu soal pelaksanaan efektif dan efisen. Ini terjadi karena beberapa faktor yaitu karena UKM PIB ini masih

baru sehingga diperlukan waktu untuk membuat UKM PIB menunjukkan eksistensi serta identitasnya. Hal itu juga lah yang menyebabkan banyak mahasiswa yang belum mengetahui UKM ini sehingga mengakibatkan anggotanya saat ini masih belum terlalu banyak, juga kegiatan yang sudah dilakukan masih sedikit dan belum terlalu terlihat di kalangan mahasiswa.

B. Saran

1. Saran Kepada UKM PIB UNNES dan USM

Untuk UKM PIB yang lebih baik lagi kedepannya yang perlu dilakukan adalah lebih banyak mensosialisasikan UKM PIB kepada mahasiswa, baik itu sosialisasi secara langsung dengan cara datang langsung ke berbagai fakultas dan jurusan maupun sosialisasi melalui media sosial bisa juga bekerjasama dengan pihak kampus untuk mensosialisasikan UKM PIB ketika masa penerimaan mahasiswa baru ataupun Ospek dengan begitu akan lebih dikenal oleh mahasiswa yang baru masuk kuliah. Selain itu juga lebih sering lagi mengadakan Seminar, Diskusi, maupun Kajian terkait Pancasila yang melibatkan mahasiswa dalam jumlah besar, salah satunya adalah bekerjasama dengan Organisasi Mahasiswa Intra seperti HIMA dan juga BEM, atau dengan Organisasi Mahasiswa Ekstra seperti GMNI, HMI, PMII, KAMMI, dan juga IMM. Hal ini perlu dilakukan agar bisa menunjukkan eksistensi UKM PIB di dalam kampus sehingga kemudian akan banyak mahasiswa yang mengetahui soal UKM PIB ini

yang juga memperbesar peluang mereka untuk bergabung bersama. Penting juga untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan Organisasi Mahasiswa Intra maupun Ekstra sehingga nanti tidak terjadi salah pengertian soal posisi dan fungsi dari UKM PIB ini di dalam kampus.

2. Saran Kepada Organisasi Mahasiswa Ekstra

Dari hasil temuan penelitian diatas dapat diketahui bahwa dari 5 Organisasi Mahasiswa Eksta yang ada di UNNES dan juga 2 Organisasi Mahasiswa Ekstra yang ada di USM, semua mempunyai pandangan yang negatif terhadap UKM PIB, dimana mereka berpandangan bahwa di bentuknya UKM PIB ini adalah agar kampus lewat UKM PIB ini bisa mengatur dan mengendalikan Organisasi Mahasiswa Ekstra, padahal sebenarnya tidak demikian, UKM PIB ini hanya mengajak agar Organisasi Mahasiswa Ekstra ini bergabung dengan UKM PIB untuk bersama-sama memberikan pembinaan maupun penguatan ideologi Pancasila kepada Mahasiswa tidak lebih dari itu. Hal ini menunjukkan terjadi salah pengertian yang cukup serius yang terjadi antara Organisasi Mahasiswa Ekstra dengan UKM PIB bisa jadi disebabkan kurangnya mereka yang berkomunikasi. Akan lebih baik jika kedua komponen ini bisa duduk bersama agar bisa menyamakan persepsi dan pandangan supaya tidak ada lagi kemudian salah pengertian seperti yang terjadi sekarang.

3. Saran kepada Mahasiswa

Bisa dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya untuk bisa mengetahui dampak dari Implementasi Permenristekdikti No 55 Tahun 2019 ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan serta misi dari dibentuknya UKM PIB itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Hamalik oemar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : Grasindo, 2002.

Setiawan Guntur, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka, 2004.

Takwin Bagus, Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutra, 2003.

Wreksosoehardjo sunaryo dalam Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2011.

Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Efendi Sofian, Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES, 2012.

Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Revisi V.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: Erlangga, 2009.

M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1988.

Afifudin dan Ahmad Saebani Beni, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

J Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta; Granit, 2004.

Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alvabeta, 2014.

Jurnal:

Puji Asmaroni ambiro, "Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era Globalisasi", Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 4, No.2 (2016).

Agus A. Aco, "Re<mark>levansi pancasi</mark>la s<mark>eba</mark>gai ideologi terbuka di era reformasi", Jurnal Office 2, No. 2 (2016).

Pipin, Skripsi: "Dinamika Organisasi Mahasiswa Ekstra kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya (Studi pada PMII, HMI, IMM, KAMMI) 1965-2013 M" Surabaya: UINSA, 2015.

Fitriani afifah dian, Yuningsih yani neneng, "Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di kabupaten cianjur", Cosmogov 2, No. 2 (2016).

Puji Asmaroini ambiro, "Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era Globalisasi", JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraa 1, No. 2 (2017).

Fadilah Nurul, "Tantangan dan penguatan ideology pancasila dalam menghadapi era revolusi industry 4.0", Journal of digital education communication and arts 2, No. 2 (2019).

Astim Riyanto, "Pancasila Dasar Negara Indonesia", Jurnal hukum dan pembangunan, tahun ke 37, No. 3 (2007).

Hadiwijono August, "Pendidikan Pancasila Eksistensinya Bagi Mahasiswa", Jurnal Cakrawala Hukum 7, No. 1 (2016).

Dwiputri Maharani Septiani dkk., "Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila", Jurnal Ketahanan Nasional 25, No. 2 (2019).

Adhinta Indra Jayusman Tria dan Widiyarta Agus, "Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswanggi Kecamatan Sukodono Sidoarjo", Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN Veteran Jatim 7, No. 2, (2017).

Alisman, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 1, No. 2, (2014).

Wayan Budiani Ni, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT 2, No. 1.

Mochammad Ramadhan, "Tinjauan Terhadap Penerapan Permenristekdikti No.55 tahun 2018 Dalam Rangka Penguatan Ideologi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia)", Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.

Prof. Dr. Ir. H. Syarif Imam Hidayat, MM, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi Melalui Pemberian Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara".

Yudistira, "Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa", Seminar Nasional Hukum 2, No. 1 (2016).

Sundawa Dadang, "Penguatan Karakter Mahasiswa Yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa", Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 1, No. 1 (2017).

Kristiono Natal, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang", Harmony 2, No. 2.

Novita Eleanora Fransiska dan Sari Andang , "Relevansi Pendidikan Pancasila dan Potret Mahasiswa Di Perguruan Tinggi", Jurnal Civic Hukum 4, No. 2 (2019).

Ishal Afryand Anzhar dan Sapriya, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)", Untirta Civic Education Journal 3, No. 2 (2018).

Marbawi Marhan, "Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Pendidikan", Turast Jurnal Penelitian dan Pengabdian 6, No. 2 (2018).

Arief Sirajuddin Ilham, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar", Jurnal Administrasi Publik 4, No. 1 (2014).

Ferbiana Silitonga Romauly, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat" Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Yogi Noviantama, "Implementasi Kebijakan program pendamping desa didesa Bogorejo kecamatan Gedong tataan kabupaten Pesawaran" Skripsi, Universitas lampung Bandar lampung, 2017.

Cahyo Pratama Dhimas, "Efektivitas Program Gerbang Desa Saburai Dalam Memajukan Desa Tertingal Di Provinsi Lampung" Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Oktavia Siahaan Esra dkk, "Evaluasi Dampak Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang Studi Kasus di Kecamatan Candisari Kota Semarang", Jurnal of Public Policy and Management 7, No. 1 (2018).

Dahlia dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan", Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik 8, No. 2 (2017).

Syamsudin Amir, "Pengembangan Instrument Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan Anak 3, Edisi 1, 2014.

Rosaliza Mita, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya 11, No. 2, 2015.

Saeful Rahmat Pupu, "Penelitian Kualitatif", Equilibrium 5, No. 9, 2009.

Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah 17, No. 33, 2018.

Vini Setya Mayang, "Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang" Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

Andrianto, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN, dan MAN Di Kabupaten Tangerang" Skripsi, Untirta Banten, 2017.

Antika Mala, "Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pembangunan Industri Kecil dan Menengah di Desa Sidodadi kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang" Skripsi, Uinsu Medan, 2017.

Sumber Lain

https://kbbi.web.id/ideologi diakses 28 juli 2020 pkl 01.30.

https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/duniakampus/18/11/04/phnv9p368-permenristekdikti-552018-berpotensi-sulut-perang-ideologi. diakses 16 november 2019 pkl 12.08.

https://nasional.okezone.com/read/2018/04/28/337/1892469/bin-39-persenmahasiswa-terpapar-paham-radikal. diakses 16 november 2019 pkl 12.40.

Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2018), Pasal 1 ayat (1) http://ditjenppkemenkumham.go.id diakses pada 5 desember 2019.

https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/duniakampus/18/11/04/phnv9p368-permenristekdikti-552018-berpotensi-sulut-perang-ideologi diakses pada 18 november pkl 14:11.

https://www.ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-sosialisasikan-permenristekdikti-nomor-55-tahun-2018-tentang-pembinaan-ideologi-pancasila-kepada-kelompok-cipayung-plus/ diakses 17 november 2019 pkl 23:46.

Siaran Pers Kemenristek No:28/SP/HM/BKKP/I/2019.

https://lldikti1.ristekdikti.go.id/details/apps/1528. diakses 20 desember 2019

www.semarangkota.bps.go.id. diakses 22 juni 2020 pkl 02:40.

Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015. diakses 22 juni 2020 pkl 02.30.

www.semarangkota.go.id diakses 22 juni 2020 pkl 02:25.

https://unnes.ac.id diakses 22 juni 2020 pkl 02:07

https://usm.ac.id diakses 22 juni 2020 pkl 03.05